

Menuju Perencana Profesional

# SIMPUL

## PERENCANA

Volume 9 | Tahun 4 | November 2007

E-Mail : [simpul@bappenas.go.id](mailto:simpul@bappenas.go.id)

**Optimalisasi  
Jabatan Fungsional Perencana**

**Kewajiban Fungsional Perencana  
di Masa Depan**

**Evaluasi  
Kondisi Jaringan Titik Kontrol Kehutanan  
Di Provinsi Sumatera Selatan**

### wawancara

Ir.Ferrerius Sugiono, M.Sc

Perencana Utama

Bappenas

HASIL PEMBANGUNAN

ADALAH BUAH DARI

KERJA KERAS BEBERAPA

TAHUN SEBELUMNYA





# Satu Negeriku

Kita akan memulai dari titik dimana Republik ini ditegakkan

Kita akan memulai dari titik dimana Republik ini ditegakkan dan Dari tanganmulah Negeri ini akan berlanjut

dan Dari tanganmulah Negeri ini akan berlanjut

Kita akan memulai dari titik dimana Republik ini ditegakkan

dan Dari tanganmulah Negeri ini akan berlanjut



## Mencoba Untuk Berbuat Lebih Baik Lagi

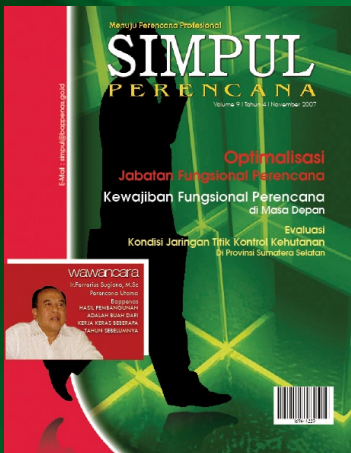
Puji syukur kami panjatkan kepda Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini Simpul dapat kembali hadir di tengah-tengah para pembaca sekalian, walaupun sedikit mengalami keterlambatan dalam terbitan edisi 9 ini, tapi kami tetap berharap apa yang kami sajikan atau apa yang kami bahas dalam edisi kali ini tidaklah menjadi sia-sia ataupun sudah kadaluarsa, kami menyadari betul apa yang menjadi kelemahan kami selama ini, untuk itu dari hari demi hari kami selalu melakukan pembenahan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam setiap penerbitan edisi berikutnya,

Pada edisi 9 ini kami lebih banyak menampilkan tulisan-tulisan seputar perencana, baik itu konsep perencanaan ataupun laporan kegiatan di daerah masing-masing yang menjadi ke ahlian mereka, akan menjadi lebih baik apabila konsep atau tulisan tersebut dapat di tindak lanjuti untuk sebuah perencanaan kedepan. Pada edisi kali ini kami juga lebih banyak menyampaikan liputan-liputan atau berita kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusbindiklatren sebagai instansi pembina perencana, hal ini harus kami sampaikan kepada pembaca sekalian agar lebih mengetahui apa sebenarnya yang sudah di lakukan oleh Pusbindiklatren dan para pembaca di daerah dapat mengetahui informasi apa saja yang di dapatkan untuk pengembangan diri selanjutnya.

Sekali lagi kami sampaikan, bahwa majalah ini hadir bukan hanya sekedar untuk sebuah rutinitas semata, akan tetapi majalah ini hadir sebagai media atau sarana informasi dan komunikasi bagi kita semua, baik itu informasi yang dapat di akses oleh pemerintah daerah berkenaan dengan program yang sedang dijalankan atau ditawarkan oleh Pusbindiklatren atau sebagai media bagi para perencana untuk mengaktualisasikan pemikirannya melalui sebuah tulisan, majalah ini di harapkan juga dapat menjadi media bagi pemerintah daerah atau para perencana di daerah untuk mensosialisasikan atau menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilakukan di daerahnya masing-masing agar dapat di ketahui oleh semua daerah di Indonesia.

Kami sangat menyadari kelemahan yang kami miliki baik itu sarana prasarana penunjang serta SDM yang kami miliki, oleh karena itu kami dari Redaksi tidak segan-segan menerima kritikan atau saran bagi kemajuan majalah ini. Tidak lupa pula kami dari Redaksi menerima tulisan atau liputan apaun yang berkenaan dengan perencanaan setiap saat. Untuk itu mari kita bersama-sama membuat majalah ini sebagai media informasi kita kedepan khususnya para perencana di Indonesia untuk lebih eksis dan menjadi yang terbaik.

Salam Kami, Simpul Perencana



## susunan redaksi

Simpul Perencana, Majalah Caturwulanan  
Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana  
PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS.

PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS |

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana |

PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Purwa Malaysianto |

WAKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso | SEKRETARIS REDAKSI : Eko Suratman |

DEWAN REDAKSI : Guspika, Haryanto, Zamilah Chaerani, Edy Purwanto, Hari Nasiri |

REDAKTUR PELAKSANA : Inda Monita, Jusuf Arbi, Karyoto, Wahyu Pribadi |

EDITOR : Dwi Putro Aris |

GRAFIS : Hendra Yudianto |

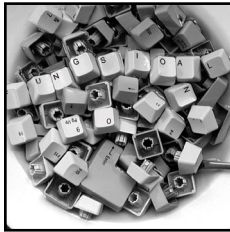
ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti, Dodi Sulistio

ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren-Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320 |

Telp. (021) 3912612 | Fax. (021) 3912613 | E-Mail : [simpul@bappenas.go.id](mailto:simpul@bappenas.go.id)

hal

6 gerbang  
cakrawala :



## **Optimalisasi Jabatan Fungsional Perencana**

...Jabatan fungsional, pelaksanaan tugasnya lebih didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri....

8



## **Kewajiban Fungsional Perencana di Masa Depan**

...Tugas awal AP2I yang cukup berat adalah meyakinkan para penanggung jawab manajemen perencanaan pembangunan bahwa tenaga fungsional perencana mampu dan siap melaksanakan tugasnya ...

14



## **Evaluasi Kondisi Jaringan Titik Kontrol Kehutanan Di Provinsi Sumatera Selatan**

18



## **Pembangunan Provinsi Maluku Sebagai Model Pembangunan Provinsi Kepulauan**

30

wawancara



## **Ir. Ferrerius Sugiono, M.Sc Perencana Utama Bappenas**

Hasil Pembangunan Adalah Buah Dari Kerja Keras Beberapa Tahun Sebelumnya

38

42 liputan

52 sosok alumni

56 akademika

58 opini

70 selingan



Redaksi Simpul yang terhormat, kami segenap pegawai di lingkungan Sekda Fak fak mengucapkan banyak terima kasih atas penerbitan dan pengiriman majalah Simpul Edisi 8 yang kemarin. Kami sangat membutuhkan sekali informasi tentang perencanaan baik itu teori maupun prakteknya, oleh karena itu kami ingin berlangganan majalah ini setiap edisinya. Mohon di informasikan lebih lanjut kepada kami.

Bapak Marten  
Sekretaris Bappeda Fak-Fak, Papua

**Simpul:** Kami merasa bangga atas apresiasi yang di berikan oleh Sekda Fak Fak, yang berada di Timur negeri ini.

Untuk pemesanan majalah Simpul Perencana dapat dilakukan melalui transfer rekening ke BNI 46 Cab. Dukuh Bawah no.rek 14393109 a.n S. Purwa Malaysianto. Sebagai ganti ongkos cetak Sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) +ongkos kirim.

Bukti pembayaran dapat di fax ke nomor:  
(021) 391 1626.

untuk info lebih lanjut dapat menghubungi:  
(021) 391 2613

---

Sebagai Perencana Muda saya sangat membutuhkan majalah ini, Banyak sekali informasi yang tidak kami dapatkan di daerah tentang program-program Beasiswa dari Pusbindiklatren, informasi dari majalah ini sangat membantu kami dalam mengakses program tersebut dan kami berharap apa yang di informasikan oleh majalah simpul khususnya program Beasiswa selalu up to date.terima kasih, maju terus Majalah simpul Perencana.

Bapak Agus Yana  
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjar  
Baru

**Simpul:** Terima kasih atas perhatian saudara bagi kemajuan majalah ini, kami redaksi akan berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan berita-berita yang memang di butuhkan dan tetap up to date.

Saya hanya ingin berlangganan majalah ini tiap edisinya, pada edisi 8 kemarin saya mendapatkannya langsung dari redaksi hanya dengan mengganti ongkos cetak, dan saya rasa sesuai dengan apa yang di informasikan oleh majalah Simpul, untuk itu selanjutnya saya ingin berlangganan.

Bapak Hendriyani  
Kabupaten Belitung Timur

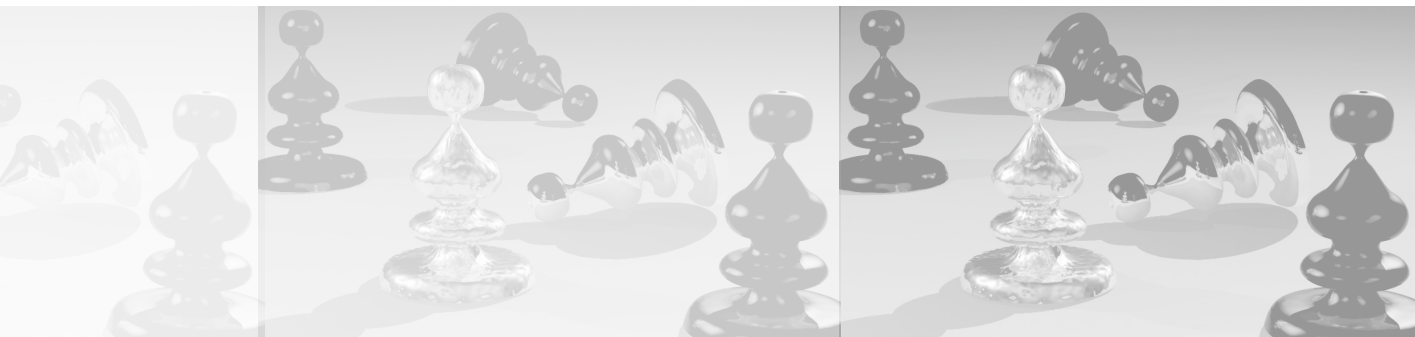
**Simpul:** Terima kasih bapak Hendri yang secara kebetulan langsung datang ke Redaksi kami di Gedung Diklat Jl. Proklamasi70, untuk edisi selanjutnya akan kami kirimkan ke alamat yang bapak berikan kepada kami

---

Sebagai Perencana saya sangat membutuhkan majalah ini dan saya ingin sekali menjadi penulis tetap majalah ini, bagaimana caranya ya?

Ibu Indri  
Direktorat Tata Kota

**Simpul:** Ibu Indri dapat mengirimkan tulisan atau artikel kapan saja melalui email kami: [simpul@bappenas.go.id](mailto:simpul@bappenas.go.id), tulisan ibu akan kami muat pada majalah simpul berdasarkan tema dan pembahasannya.



## Eksistensi Perencana Pemerintah

Bagaikan gerakan bandul pendulum, tarik-menarik di antara peran perencana dan politisi terjadi semakin kencang setelah masa euforia demokrasi di Indonesia. Dulu, ketika lembaga perencanaan semacam Bappenas dipimpin seorang ekonom sekelas Prof. Widjoyo, hasil proses perencanaan selalu mulus disetujui para politisi di lembaga legislatif. Akan tetapi kini para perencana harus berusaha sekuat tenaga melakukan proses diskusi yang panjang untuk persetujuan sebuah perencanaan.

Para politisi berperan sebagai tim penilai kualitas sebuah dokumen rencana, dan menentukan apakah layak untuk dilaksanakan dengan biaya pemerintah atau tidak. Fenomena seperti ini lazim terjadi sekarang.

Dalam situasi seperti itu yang diperlukan bukan hanya membuat para politisi itu “melek” terhadap proses dan kualitas perencanaan, namun juga menyadarkan para perencana bahwa kemampuan teknis perencanaan saja belum cukup, namun perlu ditambah dengan kemampuan untuk meyakinkan politisi. Perencanaan pun mestinya memahami nilai-nilai pembangunan yang diperlukan rakyat dan selanjutnya nilai-nilai itulah yang harus dianalisis oleh para perencana dan diubah dari tatatan

konsep menjadi program dan kegiatan yang lebih kongkrit.

Pada titik ini kemudian Friedmann (1987) pada tahun 1920-an menuntut agar perencana dianggap sebagai profesi yang memerlukan ekspert tertentu, yaitu ahli dalam memilih alternatif, menganalisis secara rasional, merumuskan tujuan sebagai solusi pemecahan masalah. Perencana mestinya memiliki kemampuan teknis untuk menterjemahkan angan-angan yang abstrak menjadi sebuah rencana tindakan yang nyata dan sistematis. Menyusun tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berupa langkah-urutan secara jelas adalah peran penting perencana. Mengenali dan melakukan identifikasi inti permasalahan. Merumuskan alternatif solusi. Memilih alternatif terbaik dan menentukan resiko setiap alternatif apabila terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

Hal lain yang merupakan peran penting perencana adalah menginformasikan kepada pengambil keputusan (dan juga memberikan penjelasan yang meyakinkan) tentang bagaimana melakukan pemantauan pelaksanaan agar tindakan sesuai dengan rencana, dan menentukan indikator-indikator kinerja yang diperlukan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat keberhasilan

pelaksanaan. Hal ini yang menjadi gambaran pentingnya peran perencana sebagai mediator yang menghubungkan tatatan konseptual menjadi suatu kenyataan pembangunan masyarakat.

*They saw planning as a form of scientific management which differed from traditional management because it brought special skills to be rational analysis and solution of social problems, Unlike administrators who deals with the tasks of everyday management, planners were primary concerned with making non-routine decisions. (Friedmann., John. Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. 1987. Page 7)*

Sidang pembaca yang terhormat, apabila perencana yang dimaksud di dalam gambaran di atas adalah perencana pemerintah atau jabatan fungsional perencana (JFP), maka di samping para JFPer yang perlu segera menyadari pentingnya peran JFP, dua hal yang perlu “disadarkan” juga adalah : (1) memperjelas posisi kegiatan perencanaan sebagai bagian tata-kepemerintahan; dan (2) memperkuat lembaga-lembaga perencanaan yang berfungsi sebagai pembina, baik teknis, profesi maupun administrasi. Pada Simpul terbitan kali ini F. Sugiono – salah seorang Perencana Utama Bappenas – menulis beberapa pemikiran yang pada intinya mengingatkan bahwa kesadaran tentang kewajiban fungsional perencana di masa depan, menjadi dasar penguatan eksistensi para perencana, masih di dalam konteks yang sama, Endang Indriati mencoba berperan sebagai Perencana Muda di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas yang mengusulkan model pembangunan di provinsi Maluku. Tulisan ini adalah salah satu contoh dokumen perencanaan yang – mungkin saja – dianggap masih belum lengkap atau terlalu dalam analisisnya. Selanjutnya, apabila mengacu pada pendapat Friedmann, saudara Endang Indriati harus mampu menjelaskan secara meyakinkan dokumen rencana tersebut kepada atasan langsung dan para stake-holders. Sementara itu Watty karyati mencoba menampilkan ide-idenya tentang pembenahan atau mengevaluasi perkembangan terakhir tentang kondisi dan situasi terakhir sarana dan prasarana kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai alat pendukung.

Untuk memberikan gambaran yang konkrit tentang sebuah perencanaan, pada rubrik wawancara ini juga menampilkan sosok perencana utama yang membagi pengalamannya dalam menggeluti profesinya begitu pula opini-opini yang tertulis dalam rubrik ini juga memberikan solusi sebuah perencanaan dari sebuah tugas dan tanggung jawab dari instansi pemerintah dengan mengambil contoh pengentasan kemiskinan dan sebuah gambaran tentang Gender; dan pada rubrik liputan kali ini pun di tampilkan program yang telah dilakukan oleh Pusbindiklatren seagai upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan individu untuk membuat sebuah perencanaan pembangunan nasional, pada rubrik akademisi juga mengangkat sebuah perencanaan tentang penanggulangan banjir di kabupaten bandung yang ditulis melalui hasil penelitian berupa Tesis. Akhir kata SELAMAT MEMBACA.

**(Dewan Redaksi)**





# Optimalisasi Jabatan Fungsional Perencana



Watty Karyati Roekmana  
Fungsional Perencana Madya  
Badan Planologi Kehutanan  
Departemen Kehutanan

## A. Pendahuluan

Jabatan Fungsional dibentuk dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional didefinisikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Berbeda dengan jabatan struktural, dimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang PNS lebih didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memimpin suatu satuan organisasi negara, maka dalam jabatan fungsional pelaksanaan tugasnya lebih didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Dengan demikian, dalam jabatan fungsional, peningkatan keahlian dan keterampilan menjadi fokus utama dalam program pengembangan PNS yang memangku jabatan fungsional.



Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Angka Kreditnya, telah secara resmi memberlakukan JFP bagi Pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan daerah.

Maksud diberlakukannya Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 adalah :

1. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara (sebagai PNS Perencana ) yang bertugas melakukan kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan.
2. Untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan/jabatan serta profesi di bidang perencanaan pembangunan.

Penerapan pelaksanaan JFP diawali dengan masa inpassing/penyesuaian ke dalam JFP yaitu mulai 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 2002, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2003. Setelah berakhirnya masa inpassing/penyesuaian tersebut, maka untuk menduduki JFP dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: Pengangkatan Pertama Kali dan Pengangkatan Melalui Pindah Jabatan.

Sampai dengan sekarang pelaksanaan JFP telah berjalan kurang lebih dari 5 (lima) tahun, dan dalam implementasi Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 banyak kendala



yang dihadapi para fungsional perencana baik di tingkat Pusat terutama di institusi perencanaan teknis departemen dan lembaga non departemen maupun di institusi perencanaan daerah seperti Bappeda provinsi dan kabupaten/kota.

#### **B. Masalah / kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001**

Dalam pelaksanaannya di berbagai Instansi baik pusat maupun daerah, Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 mengalami beberapa kendala yang bervariasi antara lain :

1. Posisi Jabatan Fungsional Perencana Sebagai Jabatan karir dianggap masih lemah dan belum ada peraturan tersendiri mengenai tata

hubungan kerja atau pembagian kerja yang jelas antara fungsional perencana dengan struktural.

2. Masih adanya perbedaan persepsi terhadap butir butir kegiatan yang tercantum pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas No. KEP.235/M. PPN/04/2002 tanggal 5 april 2002, tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana sebagai penjabaran butir - butir kegiatan yang dinilai pada Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.
3. Belum optimalnya peran Tenaga fungsional Perencana dalam mekanisme Perencanaan di institusi perencanaan. Posisi JFP sebagai jabatan karier

dianggap masih lemah dan belum ada peraturan tersendiri yang mengatur tata hubungan kerja yang jelas antara fungsional perencana dengan struktural. Kedudukan JFP dalam struktur organisasi di berbagai departemen (pusat) saat ini umumnya berada di bawah Sekjen (Biro), sedangkan di Bappeda (daerah) berada langsung dibawah kepala Bappeda, namun berdasarkan pengalaman para fungsional perencana dari daerah (Bappeda provinsi dan kabupaten/kota), pada pelaksanaannya kegiatan JFP kadang berada dibawah seksi /subbidangnya. Untuk itu perlu adanya aturan tata hubungan kerja yang jelas antara fungsional perencana dengan strukturalnya dan perlu dibangun suatu kerjasama yang sinergis antara pejabat struktural dan fungsional dengan tujuan untuk saling mengisi, melengkapi dan mendukung sehingga dapat terbangun kesetaraan antara fungsional dan struktural.

Kep.menpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP. 235/M.PPN/04/2002, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Angka Kredit Perencana, bersifat umum dan multi tafsir sehingga sering terjadi perbedaan persepsi terhadap unsur dan sub unsur kegiatan perencanaan yang dinilai. Untuk instansi lembaga departemen dan non Departemen

yang bersifat spesifik teknis seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LAPAN dan departemen teknis lainnya perlu adanya padanan juknis Penilaian Angka Kredit Perencana yang sesuai dengan kegiatan spesifik di departemen / lembaga non departemen masing-masing.

Peran Tenaga fungsional Perencana dalam mekanisme Perencanaan di institusi perencana baik pusat maupun daerah belum optimal, hal ini dikarenakan antara lain :

1. Pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills) para JFP sangat beragam dan sangat tergantung pada individunya,
2. Kurangnya komitmen pimpinan,
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang serta alokasi anggaran biaya kegiatan bagi para JFP dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana.

### C. Optimalisasi peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP)

#### 1. Pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan profesionalisme (Attitude).

Tugas utama perencana adalah menghasilkan perencanaan yang berhubungan dengan

penyusunan kebijakan yang akan menjadi arah pembangunan. Di Kep.menpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, kegiatan perencanaan sebagai proses dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan, perumusan alternatif, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana, pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sebagai perencana yang akan melaksanakan seluruh tahapan perencanaan tersebut, haruslah didukung dengan kompetensi yang memadai sesuai jenjang perencana. Semakin tinggi jenjang seseorang didalam JFP semakin tinggi pula tuntutan kapasitas yang harus dimilikinya.

Kompetensi tersebut dapat dilihat dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan Attitude (profesionalisme).

Setiap jenjang perencana membutuhkan pengetahuan yang cukup sesuai bidang dan tanggung jawabnya agar output perencana bisa optimal dan berkualitas. Sebagai perencana yang akan berhubungan dengan berbagai pihak, maka tentunya diperlukan keahlian-keahlian yang akan menunjang pelaksanaan kegiatannya.

Output perencanaan perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, oleh karena itu seorang perencana haruslah mempunyai kemampuan membuat laporan yang mudah dimengerti





oleh berbagai pihak dan mampu mempresentasikan perencanaan dan meyakinkan pentingnya perencanaan tersebut. Selain pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sebagai perencana juga perlu memiliki sikap-sikap yang mendukung profesionalisme sebagai perencana yang biasa disebut attitude.

Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) dan perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*). Sikap seseorang dibentuk oleh pengalaman, pengaruh dari orang sekitarnya, pengaruh budaya, media masa, lembaga pendidikan dan agama serta pengaruh emosional. Hal ini berkaitan dengan kemampuan merespon seseorang terhadap permasalahan yang ada.

Secara umum, perencana harus mempunyai sikap berorientasi jangka panjang, mampu bekerjasama dalam kelompok (*team work*), integritas diri dan mempunyai komitmen terhadap organisasi/institusinya. Pengetahuan dan keterampilan para fungsional perencana dengan berbagai jenjang di masing - masing Institusi perencanaan saat ini sangatlah beragam, sehingga perannya belumlah optimal dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

Untuk peningkatan kapasitas, para fungsional perencana perlu meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan latihan

berkualitas yang bersifat substantif perencanaan maupun penjenjangan.

Diklat fungsional substantif perencana yaitu diklat yang mendukung tugas pokok dan fungsi instansi/unit perencanaan terkait dengan substansi yang ditujukan untuk memperkaya kompetensi perencana.

Diklat fungsional penjenjangan perencana yaitu diklat yang diperuntukan bagi PNS yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana dan dimaksudkan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi bidang perencanaan bagi PNS yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana yang terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu : (1) Diklat fungsional Perencana tingkat Pertama, (2) Diklat fungsional Perencana tingkat Muda, (3) Diklat fungsional Perencana tingkat Madya dan (4) Diklat fungsional Perencana tingkat Utama.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan diatur dengan KepmenneqPPN /kepala Bappenas nomor KEP. 013/M.PPN/02/2003 yang menjamin pelaksanaan diklat fungsional penjenjangan perencana dapat terlaksana secara terbuka, partisipatif dan akuntabel.

## 2. Komitmen Pimpinan

Sebagai kosekuensi diberlakukannya JFP di berbagai institusi perencanaan baik di Pusat maupun daerah, maka komitmen pimpinan terhadap para pemang-

“ Jabatan fungsional, pelaksanaan tugasnya lebih didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri ”





ku jabatan fungsional perencana sangatlah penting dalam memacu bagaimana pelaksanaan JFP dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanat Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001. Komitmen untuk menjadikan JFP sebagai profesional, yang melaksanakan tugasnya dalam rangka menjalankan pelayanan profesi berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Komitmen agar JFP dapat berfungsi dan berperan dalam proses perencanaan pembangunan. Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi untuk bekerja, sehingga para fungsional perencana dapat memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan informasi dan data akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

### 3. Sarana dan prasarana pendukung bagi jabatan fungsional perencana

Adanya jabatan fungsional perencana di institusi perencanaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan kualitas perencanaan yang lebih baik, namun perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan tenaga fungsional perencana agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selain sarana dan prasarana para fungsional perlu

mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk meningkatkan kapasitasnya dan melaksanakan kegiatannya.

Alokasi anggaran /dana yang harus disediakan oleh setiap institusi perencanaan untuk mendukung JFP baik di Pusat maupun daerah yaitu untuk :

1. Kegiatan pendidikan dan latihan ( dalam negeri maupun luar negeri, gelar dan non gelar, penjenjangan dan substantif perencanaan ).
2. Kegiatan Perencanaan (al. mengikuti proses kegiatan perencanaan tingkat regional maupun tingkat nasional dalam sinkronisasi perencanaan di daerah dan pusat, evaluasi perencanaan pembangunan tingkat regional dan nasional)
3. Kegiatan Pengembangan profesi perencanaan (penyusunan dan penggandaan karya tulis , kajian dan workshop isu-isu strategis pembangunan, melakukan studi banding di bidang perencanaan pembangunan baik di dalam maupun luar negeri dll.)
4. Kegiatan Penunjang (mengikuti kegiatan seminar/lokakarya baik di dalam maupun luar negeri, mengikuti kegiatan organisasi profesi dll)

### D. Penutup

Kepmenpan nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP. 235/M.PPN/04/2002, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Angka Kredit Perencana, bersifat umum, sehingga perlu adanya padanan juknis Penilaian Angka Kredit Perencana yang sesuai dengan kegiatan spesifik teknis di departemen / lembaga non departemen masing-masing.

Tenaga fungsional perencana dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitasnya, baik melalui pendidikan maupun pelatihan agar dapat menghasilkan output perencanaan yang berkualitas dengan kredibilitas kuat. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan JFP sangat penting dalam rangka optimalisasi peran JFP di institusi perencanaan baik di Pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perencana, JFP memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta alokasi anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas perencanaan yang lebih baik.





# Kewajiban Fungsional Perencana di Masa Depan



Oleh: Ir. Ferrerius Sugiono, MSc  
Perencana Utama Bappenas

Sejak tanggal 19 Maret 2001 melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya, semua pegawai negeri sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional perencana. Sampai saat ini sudah 6 tahun berjalan tetapi masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan secara tuntas terutama berkaitan dengan BAB II KEPMENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 seperti tersebut diatas tentang rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok jabatan fungsional perencana.

Dampak langsung dari belum jelasnya jabatan, kedudukan dan tugas pokok tersebut, baik para pejabat fungsional perencana maupun pejabat struktural yang tergabung dalam suatu rumpun manajemen pemerintahan, belum mengetahui dengan pasti keberadaan masing-masing pihak. Sebagai contoh di Bappenas sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana pada tanggal 28 Februari 2005 telah mengeluarkan keputusan Sesmeng PPN/Sestama Bappenas No. Kep.008/SES/02/2005 tentang pedoman teknis pembinaan jabatan fungsional perencana di lingkungan Bappenas, tetapi sampai sekarang belum pernah dilakukan sosialisasi kepada semua pegawai. Sehingga pemahaman tupoksi antar pejabat fungsional dengan struktural masih belum jelas. Apalagi di tingkat daerah seperti Bapeda Tingkat I maupun Bapeda Tingkat II.

A black and white photograph of a man's face, partially obscured by binoculars he is holding up to his eyes. The man has a beard and is looking intently through the lenses. The background is blurred.

duty in the future

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan awal dibentuknya jabatan fungsional perencana yaitu meningkatkan mutu dan prestasi pegawai negeri sipil yang mempunyai tupoksi di bidang perencanaan pembangunan, perlu dipersiapkan langkah-langkah pemberdayaan sumber daya manusia yang ada khususnya perencana. Langkah-langkah ini baik untuk pembina maupun oleh pejabat fungsional sendiri, sehingga diharapkan diperoleh kesepakatan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada institusi perencanaan pembangunan oleh masyarakat.

### Langkah-langkah pemberdayaan jabatan fungsional perencana

#### 1. Peran aktif Pejabat Fungsional Perencana

Sesuai dengan desain awal penetapan jabatan fungsional perencana adalah menciptakan kelompok kerja yang tak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan, baik bersifat sektoral maupun kewilayahan. Untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu disadari oleh para pejabat fungsional bahwa perannya sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan secara profesional. Peran pejabat fungsional diharapkan dapat melakukan rangkaian proses mulai dari pengolahan data berdasarkan

asumsi atau fakta, pemilihan alternatif kegiatan, proses pelaksanaan, pengawasan selama pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan. Peran ini pada awalnya akan sangat baik hasilnya kalau dilakukan oleh perencana yang tidak dipengaruhi oleh keinginan sepihak. Kemandirian berdasarkan profesional yang dimiliki menjadi prasarat bagi tenaga fungsional perencana.

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas tenaga fungsional perencana dituntut memiliki rasa tanggung jawab atas tupoksi yang diberikan, melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan. Untuk masa sekarang seperti kita ketahui bersama bahwa saling pemahaman tupoksi antara pejabat struktural dan fungsional belum berjalan sepenuhnya seperti yang diharapkan. Sehingga perlu dimulai suatu aktivitas oleh tenaga fungsional untuk menjalankan sesuai bidang tupoksinya mendahului penugasan dari pejabat struktural sesuai aturan yang ada. Masalah ini bukan semata-mata akan menerjang aturan yang ada, tetapi lebih berupaya untuk dapat meyakinkan para penanggung jawab tugas bahwa tenaga fungsional yang sudah ada dapat dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada. Selain itu dapat dihindarkan kecenderungan penggunaan tenaga " proyek " non PNS untuk menjalankan tupoksi perencanaan.

#### 2. Peran aktif Pembina Pejabat Fungsional Perencana.

Unsur pembinaan dalam jabatan fungsional perencana terdiri atas pembina teknis, pembina profesi dan pembina administrasi. Pembina teknis bertanggung jawab atas pembagian tugas operasional, pembina profesi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan, sedang pembina administrasi mempunyai tugas yang berkaitan dengan status kepegawaian. Sebagai contoh di Bappenas pembina teknis dilakukan oleh Eselon I dan Eselon II, pembina profesi oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, sedang pembina administrasi oleh Biro Kepegawaian. Tugas masing-masing unsur pembinaan jabatan fungsional perencana mencakup:

##### a. Pembina Teknis

- Pemberian tugas dalam rangka menyelesaikan tupoksi unit kerja
- Pengembangan kompetensi berupa diklat gelar/non gelar, seminar, baik sebagai peserta maupun narasumber.
- Pengembangan karir berupa peningkatan pangkat dan jabatan baik dalam lingkup jabatan struktural maupun fungsional.
- Melakukan evaluasi kinerja jabatan fungsional.
- Menyediakan fasilitas kerja.

**“ Tugas awal AP2I yang cukup berat adalah meyakinkan para penanggung jawab manajemen perencanaan pembangunan bahwa tenaga fungsional perencana mampu dan siap melaksanakan tugasnya ”**

**b. Pembina Profesi**

- Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi pejabat fungsional perencana untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas.
- Melakukan upaya integrasi antara pejabat fungsional perencana pusat dan daerah.

**c. Pembina Administrasi**

- Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian yang meliputi penempatan, kenaikan pangkat, dan persiapan pensiun.

Sekali lagi pemberdayaan jabatan fungsional perencana dapat terlaksana bila ada upaya aktif kedua belah pihak, yaitu pejabat fungsional perencana sendiri dan para pembinanya. Tanpa adanya kesepahaman atas tupoksi perencana maka kinerja unit pelaksana tidak akan mencapai hasil yang optimal. Jadi ke depan harus segera diupayakan aturan main penyelesaian tupoksi perencanaan pembangunan antara pejabat fungsional dengan pejabat struktural yang pada dasarnya bertanggung jawab terhadap manajemen perencanaan. Masalah ini bukan saja untuk tingkat pusat tetapi juga pada tataran daerah, baik untuk Bapeda Tingkat I maupun Bapeda Tingkat II, selain itu juga hubungan kerja antara perencana pembangunan dipusat dengan perencana pembangunan di daerah.







### 3. Peran aktif organisasi fungsional perencana

Sekarang kita telah mempunyai organisasi profesi di bidang perencanaan yaitu Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2006, dimana komisariat Bappenas telah pula diresmikan pada tanggal 28 September 2007. Maka untuk mencapai tujuan AP2I sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar AP2I yaitu:

- a) Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana;
- b) Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana;
- c) Menetapkan kode etik perencana; dan
- d) Mengembangkan jejaring kerjasama antar anggota AP2I, perlu segera dilakukan evaluasi pelaksanaan pembentukan jabatan fungsional perencana baik ditingkat pusat maupun daerah.

Khusus Komisariat AP2I Bappenas dituntut perannya lebih aktif mengingat keberadaannya pada instansi perencana pembangunan ditingkat pusat, agar dikemudian hari dapat menjadi contoh yang baik bagi instansi/unit perencana ditempat lain.

Tugas awal AP2I yang cukup berat adalah meyakinkan para penanggung jawab manajemen

perencanaan pembangunan bahwa tenaga fungsional perencana mampu dan siap melaksanakan tugasnya. Khusus bagi Komisariat AP2I Bappenas dimana nantinya diharapkan dapat menjadi pendorong AP2I secara nasional, mulai saat ini harus aktif mendorong terciptanya landasan operasional kerja pejabat fungsional perencana. Landasan operasional tersebut antara lain:

- a) Hubungan kerja antara pejabat struktural dengan fungsional perencana;
- b) Kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh pegawai negeri sipil;
- c) Penetapan batas usia pensiun bagi tenaga fungsional perencana;
- d) Mengevaluasi kembali kejelasan aturan main pengumpulan angka kredit; dan
- e) Kesetaraan fasilitas kerja.

Demikianlah beberapa kewajiban bagi pejabat fungsional perencana agar keberadaannya dapat diterima dan berfungsi seoptimal mungkin. Selain tentunya harus disertai kearifan bagi kolega terkait dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi perencana pembangunan.

# Evaluasi Kondisi Jaringan Titik Kontrol Kehutanan Di Provinsi Sumatera Selatan

(Hasil survei yang dilaksanakan oleh penulis pada tahun 2007)



Watty Karyati Roekmana  
Fungsional Perencana Madya  
Badan Planologi Kehutanan  
Departemen Kehutanan

## I. Pendahuluan

Global Positioning System (GPS) adalah salah satu metoda pengukuran posisi, baik dalam dua dimensi maupun tiga dimensi pada permukaan bumi yang berbasis pada teknologi satelit. Teknologi GPS digunakan pertama kali pada lingkup Departemen Kehutanan pada tahun 1992. Salah satu tujuan pemanfaatan teknologi ini adalah untuk menggantikan teknologi optis dalam pembuatan Ground Control Point (GCP). Kegiatan ini dinamakan Pemasangan (jaringan) Titik Kontrol Kehutanan (JATIKON). Pemasangan JATIKON Kehutanan diperlukan untuk mendukung kegiatan pengukuran lapangan (sebagai referensi/titik ikat) seperti pengukuran batas kawasan hutan, jaringan jalan angkutan kayu, inventarisasi sumber daya hutan, koreksi/revisi peta, pengawasan (pengecekan) suatu kegiatan baik oleh Hak Pengusahaan Hutan /Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Alam maupun Tanaman) serta aktivitas lainnya yang berhubungan / berada dalam kawasan hutan.

Pelaksanaan pemasangan jaringan titik kontrol kehutanan dimulai sejak tahun 1993 oleh Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN). Sampai dengan tahun 2007, telah terpasang sebanyak 1435 titik kontrol kehutanan yang tersebar di 22 Provinsi (data laporan bulan juni 2007 Pusat Inventarisasi dan Perpetaan, Badan Planologi Kehutanan). Untuk percepatan pelaksanaan pemasangan titik kontrol pada daerah-daerah yang sangat membutuhkan titik-titik ikat, maka pada tahun 1996 Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH (dulu BIPHUT) Wilayah II Palembang mulai membantu pelaksanaan pemasangan titik kontrol GPS pada wilayah kerjanya. Sampai saat ini jumlah titik kontrol Kehutanan/GPS yang telah dipasang oleh BAPLAN / BPKH wilayah II di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 80 titik yang



tersebar di 10 Kabupaten dan 2 kota . Kegiatan pemasangan titik kontrol ini masih akan berlangsung sesuai dengan perkembangan kebutuhan . Selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun pelaksanaan pemasangan titik kontrol Kehutanan oleh BAPLAN/BIPHUT/BPKH, belum pernah dilakukan inventarisasi serta pemeliharaan pilar-pilar/titik kontrol yang telah terpasang. Untuk itu, terkait dengan dinamika pembangunan di masing-masing provinsi, dan mengingat umur pilar/titik kontrol yang telah terpasang berusia lebih dari 5 tahun, serta bahwa titik kontrol tersebut juga merupakan aset negara, perlu adanya suatu kegiatan pemantauan/ pengecekan kondisi/ keberadaan titik kontrol kehutanan di lapangan.

Dari sisi pemanfaatannya, keberadaan titik kontrol ini masih belum optimal, banyak masukan yang disampaikan oleh instansi internal baik secara lisan maupun tulisan yang pada dasarnya memberikan kritik membangun agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan JATIKON ini dapat dioptimalkan. Penempatan titik kontrol kehutanan ini didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain di sekitar kawasan hutan, aksesibilitas, kemudahan pengguna, keamanan, kestabilan lokasi, dan keterbukaan ruang

untuk menangkap sinyal dari satelit. Khusus bagi daerah-daerah yang masih sangat jauh dari kawasan hutan penempatan titiknyadilakukandi luar kawasan hutan yang dimaksudkan sebagai penghubung / merapatkan titik. Penempatan titik kontrol yang ada antara lain di pal batas, di sekitar kawasan hutan baik yang berpenghuni maupun yang tidak, di areal kantor pemerintah, areal sekolah dan lain sebagainya.

Data kondisi titik kontrol kehutanan yang dipantau dari hasil kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi serta perumusan rekomendasi terhadap penanganan jaringan titik kontrol kehutanan sesuai kondisinya dilapangan.

## II. Ruang Lingkup dan Metodologi

### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terdatanya kondisi titik-titik kontrol kehutanan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Terperbaharainya data / informasi titik-titik kontrol kehutanan yang pernah dibuat/dipasang.
3. Tersedianya bahan evaluasi kegiatan pemasangan titik kontrol kehutanan.
4. Rekomendasi atas titik-titik kontrol kehutanan yang telah rusak / hilang.

### B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembuatan peta kerja, pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak), pembuatan rencana kerja, koordinasi, pengecekan titik kontrol di lapangan, pengisian log sheet, dokumentasi, serta pelaporan. Jumlah Pilar/Titik Kontrol yang dipantau/dicek di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 30 pilar/titik kontrol yang tersebar di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan dan 2 Kota yaitu Kota Lubuk Linggau dan Pagar Alam.

### C. Bahan, Peralatan dan Metodologi

Bahan dan peralatan yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Peta Kerja Pemantauan/ Pengecekan Kondisi Titik Kontrol Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 500.000.
2. Daftar koordinat titik kontrol yang akan dipantau / dicek.
3. Daftar deskripsi lokasi titik kontrol yang akan dipantau / dicek.
4. Receiver GPS tipe navigasi / mapping.
5. Kompas
6. Kamera



Metode yang digunakan adalah survei / pengamatan lapangan (langsung) kondisi tiap titik kontrol kehutanan dan pendataan kembali deskripsi lokasi sesuai rencana kerja, peta kerja, dan daftar koordinat titik kontrol yang dipantau dengan menggunakan Receiver GPS tipe navigasi/mapping.

Titik kontrol yang dipantau / dicek yaitu titik-titik kontrol yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.

### III. Kondisi Jaringan titik kontrol kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan

Sampai dengan Juni 2007 jumlah titik kontrol kehutanan yang telah dipasang di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 80 titik/pilar (data laporan bulan Juni 2007 Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan)

Dari 80 titik/pilar tersebut dipilih 30 titik yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih untuk dipantau / dicek di lapangan.

Secara administratif 30 titik yang dipantau tersebar di 6 (enam) kabupaten dan 2 (dua) kota yaitu :

1. Kab. Muara Enim 6 titik
2. Kab. Lahat 4 titik
3. Kab. Musi Rawas 4 titik
4. Kab. Ogan Komering Ulu 4 titik
5. Kab. Empat Lawang 3 titik
6. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7 titik
7. Kota Lubuk Linggau 1 titik
8. Kota Pagar Alam 1 titik

Hasil survei lapangan titik kontrol kehutanan adalah sebagaimana tertera dalam tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Pemantauan/Pengecekan Kondisi Titik Kontrol Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan**

NO	NOMOR PILAR	KABUPATEN	KONDISI		
			Baik	Rusak	Tercabut
1.	N 07001	Muara Enim	x		
2.	N 07002	Muara Enim		x	
3.	N 07004	Muara Enim	x		
4.	N 07005	Muara Enim			x
5.	N 07027	Muara Enim		x	
6.	N 07063	Muara Enim	x		
7.	N 07006	Lahat	x		
8.	N 07007	Lahat		x	
9.	N 07016	Lahat	x		
10.	N 07062	Lahat	x		
11.	N 07009	Musi Rawas	x		
12.	N 07010	Musi Rawas	x		
13.	N 07056	Musi Rawas	x		
14.	N 07059	Musi Rawas		x	
15.	N 07017	Ogan Komering Ulu		x	
16.	N 07023	Ogan Komering Ulu	x		
17.	N 07064	Ogan Komering Ulu		x	
18.	N 07065	Ogan Komering Ulu		x	
19.	N 07020	Ogan Komering Ulu Selatan			x
20.	N 07021	Ogan Komering Ulu Selatan	x		
21.	N 07024	Ogan Komering Ulu Selatan	x		
22.	N 07066	Ogan Komering Ulu Selatan		x	
23.	N 07067	Ogan Komering Ulu Selatan		x	
24.	N 07068	Ogan Komering Ulu Selatan	x		
25.	N 07070	Ogan Komering Ulu Selatan		x	
26.	N 07008	Empat Lawang	x		
27.	N 07011	Empat Lawang	x		
28.	N 07013	Empat Lawang	x		
29.	N 07014	Kota Pagar Alam		x	
30.	N 07057	Lubuk Linggau		x	

### Kabupaten Muara Enim

Dari 6 titik/pilar yang dicek di kabupaten Muara Enim, terdapat 3 titik/pilar dalam kondisi baik, 2 titik/pilar dalam kondisi rusak tetapi masih dapat digunakan dan 1 titik/pilar tercabut.

□ Kondisi Pilar/titik kontrol N 07001 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07001 berada di halaman Kantor Kepala Desa Tebat Agung, Jalan raya Prabumulih - Muara Enim, Kecamatan Rembang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 75 km dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

□ Kondisi Pilar/titik kontrol N 07002 dalam keadaan rusak, pilar sompal tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07002 berada di halaman depan TK Satu Atap dan SDN No. 4, Desa Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi



Contoh Pilar/titik kontrol kehutanan dalam kondisi baik (N 07063)

pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 75 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

□ Kondisi Pilar/titik kontrol N 07004 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07004 berada di teras Kantor Dinas Kehutanan Muara Enim, Jln Raya Palembang - Muara Enim, masuk Jln Bambang Utoyo, Kelurahan Pasar Dua, Kecamatan

Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 5 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

□ Kondisi Pilar/titik kontrol N 07005 dalam keadaan tercabut, namun masih berada di halaman Kantor Camat Tanjung Agung, Jln Lintas Sumatera Baturaja - Muara Enim, Kelurahan



Contoh Pilar/titik kontrol kehutanan dalam kondisi baik (N 07063)

Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Sekitar 25 meter dari pilar/ titik yang tercabut tersebut terdapat Titik Kontrol Geodesi BPN No. 04.139. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm 3$  km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07027 dalam keadaan rusak, tapak pilar rusak/sompal tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07027

berada di halaman samping SDN 93 Pagar Dewa, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm 3,5$  km dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07063 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07063 berada di halaman sebelah kanan Rumah Sakit PT. Bukit Asam (BA), kompleks PT BA, Kelurahan Tanjung,

Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

### Kabupaten Lahat

Dari 4 titik/pilar yang dicek di Kabupaten Tanah Lahat, terdapat 3 titik/pilar dalam kondisi baik dan 1 titik/pilar dalam kondisi rusak, tetapi masih dapat digunakan.

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07006 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07006 berada di halaman depan bekas Kantor Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Kikim Timur. Jln Raya Lahat – Tebing Tinggi Km 275. Sekitar 40 m sebelah kiri Kantor Polsek Kikim Timur. Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm 6$  km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07007 dalam keadaan



rusak, pilar sompal tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07007 berada di depan pasar Babat Baru, Kelurahan Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 12,5 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07016 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07016 berada di halaman bekas Kantor Kepala Desa Air Dingin baru, Kecamatan Kota Agung, Jln Raya Lahat – Pagar Alam ± Km 30. Desa Air Dingin Biru, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 2 km dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N

07062 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07062 berada di Eks Kebun Pak Sugeng yang sekarang telah menjadi kebun Ibu Mimi, di Kiri jalan menuju Talang Kemang, ± 1 km masuk dari jalan Raya. Desa Talang Tinggi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 1,5 km dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW).

#### **Kabupaten Musi Rawas**

Dari 4 titik/pilar yang dicek di Kabupaten Musi Rawas, terdapat 3 titik/pilar dalam kondisi baik dan 1 titik/pilar dalam kondisi rusak, tetapi masih dapat digunakan.

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07009 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07009 berada di halaman Kantor Kepala Desa Muara Beliti Baru, Jln Raya Muara Beliti – Lubuk Linggau ± 200 meter sebrang jembatan timbang. Desa Muara Beliti baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peta

Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 12,5 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07010 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07010 berada di halaman Kantor Camat Batu Kuning Lakitan/ BKL Ulu Terawas, dan didepan SDN 1 Terawas, Jln Raya Lintas Sumatera Lubuk Linggau - Sorolangun. Kecamatan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 7,5 km dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07056 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07056 berada di halaman Puskesmas Pembantu desa Tabagindo, disamping kantor Kepala Desa Tabagindo dan didepan tower Telkomsel, Kecamatan

Selangit, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07059 dalam keadaan rusak, pilar terkelupas tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07059 berada di halaman Puskesmas Pembantu Desa Petunang, Jalan Raya Muara Kelingi – Muara Beliti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 8 km dari Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK).

#### **Kabupaten Empat Lawang**

Dari 3 titik/pilar yang dicek di Kabupaten Empat Lawang, seluruhnya dalam kondisi baik.

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07008 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07008 berada di halaman bekas kantor Kepala Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat

Lawang, disamping rumah Penduduk (Pak Amir), Jalan Raya Lubuk Linggau – Tebing Tinggi ± 25 km dari Tebing Tinggi. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 5 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07011 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07011 berada di halaman bekas Poliklinik Desa Kembahang Baru, Jalan Raya Tebing Tinggi – Tanjung Raya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 4 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07013 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07013 berada di halaman SD 09 Desa Sawah (dulu SD No. 16), Jalan Raya Lahat – Tebing Tinggi, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan Peta

Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 1,5 km dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW).

#### **Kabupaten Ogan**

##### **Komering Ulu**

Dari 4 titik/pilar yang dicek di Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdapat 1 titik/pilar dalam kondisi baik dan 3 titik/pilar dalam kondisi rusak, tetapi masih dapat digunakan

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07017 dalam keadaan rusak (sompal), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep pudar dan warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07017 berada di halaman sebelah kanan labor SDN 115 Ogan Komering Ulu (dulu kantor Camat), disamping tower Mentari/XL, Kecamatan Pengadonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 5 km dari Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07023 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas, namun warna kuningnya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07023

berada di halaman SD 77 Desa Tanjung Lengkayap, Jalan Raya Baturaja – Muara Dua, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pilar ini berdampingan dengan Titik Kontrol Geodesi BPN No. 04759. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 5 km dari Kawasan Hutan Lindung (HL).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07064 dalam keadaan rusak (sompal), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07064 berada di halaman Kantor Kepala Desa Tungku Jaya, didepan Lokasi Wisata Rantau Kumpay, Jalan Trans ke Rantau Kumpay, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 1 km dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07065 dalam keadaan rusak (semen pilar terkelupas), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep

masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07065 berada di halaman SDN 85 Sukaraja Ogan Komering Ulu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 1,5 km dari Kawasan Hutan Lindung (HL).

#### **Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Dari 7 titik/pilar yang dicek di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdapat 3 titik/pilar dalam kondisi baik, 3 titik/pilar dalam kondisi rusak tetapi masih dapat digunakan dan 1 titik/pilar tercabut .

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07020 dalam keadaan tercabut, namun masih berada di halaman Kantor Kepala Desa Pulau Beringin (halaman desa telah dibangun bangunan TK, sehingga pilar dicabut), Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol yang tercabut ini berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 1 km dari Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Nanti.

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07021 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07021 berada di halaman SDN Tanjung Raya, Jalan Raya Muara Dua – Pulau Beringin, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pilar ini berdampingan dengan Titik Kontrol Geodesi BPN No. 04151. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 8 km dari Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kondisi pilar/titik kontrol N 07024 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07024 berada di halaman Depan Kantor Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (bekas kantor camat), Jalan Wedana Pangku No. 18 Muara Dua , Samping Polsek Muara Dua, Kelurahan Serdang Jati, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar ± 6 km dari Kawasan Hutan Lindung (HL)



- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07066 dalam keadaan rusak (semen pilar terkelupas), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07066 berada di halaman bekas kantor

Kepala Desa Negri Batin, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm 4$  km dari

Kawasan Hutan Lindung (HL).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07067 dalam keadaan rusak (pilar sompal), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07067 berada di halaman kantor Kepala Desa bungin Campang, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Disamping pilar ini terdapat Pilar BPN no. 002. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada di dekat Kawasan Hutan Lindung (HL).

- Kondisi pilar/titik kontrol N 07068 dalam keadaan baik, identitas breskep masih jelas. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07068 berada di halaman Depan Kantor Camat Muara Dua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, posisi pilar/titik kontrol berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm 6$  km dari Kawasan Hutan Lindung (HL).

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 07070 dalam keadaan rusak (pilar sompal dan semen terkelupas), tetapi masih dapat digunakan, identitas



breskep masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07070 berada di halaman SDN 1 Simpang Campang, Kecamatan Muara dua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Disamping pilar ini ( $\pm 100$  m ) terdapat Pilar Titik Kontrol Geodesi BPN no. 04169. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada sekitar  $\pm 1,5$  Km dari Kawasan Hutan Lindung (HL).

#### **Kota Pagar Alam**

- Kondisi Pilar/titik kontrol N 070014 dalam keadaan rusak (pilar sompal), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07014 berada di halaman Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam, Jln. Serma Marzuki,  $\pm 20$  m samping Puskesmas Sidorejo, Sebrang Kantor Koramil Pagar Alam ( $\pm 200$  m), Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada sekitar  $\pm 7$  Km dari Kawasan Hutan Lindung (HL).

#### **Kota Lubuk Linggau**

- Kondisi Pilar/titik kontrol N

07057 dalam keadaan rusak (pilar terkelupas), tetapi masih dapat digunakan, identitas breskep masih jelas, namun warna kuning nya sudah pudar. Lokasi Pilar/Titik kontrol N 07057 berada di halaman Kantor Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, Seksi Konservasi Wilayah V, Provinsi Sumatera Selatan, Jln Garuda Km 4,5, Sebrang Kantor PDAM, Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan posisi pilar/titik kontrol berada sekitar  $\pm 0,75$  Km dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan wisata (HSAW)

#### **IV. Analisis Kontribusi Keberadaan Titik Kontrol Kehutanan Di Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pemantapan Kawasan Hutan**

Tujuan/manfaat utama yang diharapkan dari titik kontrol kehutanan yaitu untuk mendukung pemantapan kawasan hutan dalam bentuk penyediaan titik kontrol / referensi untuk pengukuran dan pemetaan kawasan hutan. Untuk mengukur kontribusi keberadaan titik kontrol kehutanan terhadap pemantapan kawasan hutan secara umum

dapat menggunakan pendekatan berdasarkan kemudahan untuk pengguna (juru ukur / juru tafsir / staf survei dan pemetaan).

Untuk menilai kemudahan bagi pengguna dapat dilihat dari posisi pilar terhadap batas kawasan hutan, baik batas luar maupun batas fungsi. Namun dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan batas fungsi relatif lebih mudah penyelesaiannya dibandingkan dengan permasalahan pada batas luar, maka batas luar merupakan prioritas utama. Sehingga dengan demikian titik kontrol yang berada sekitar batas luar kawasan hutan cukup strategis/potensial pemanfaatannya.

Apabila kawasan hutan setempat telah ditatabatas, maka pemasangan titik kontrol kehutanan dapat ditempatkan pada pal batas, dan ini memiliki kontribusi yang tinggi terutama jika akan dilakukan rekontruksi batas dan reposisi batas tersebut pada peta dasar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lokasi titik kontrol kehutanan yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah bilamana titik tersebut berada pada pal batas di kawasan hutan yang merupakan batas luar kawasan dan non kawasan hutan/ Areal Penggunaan Lain. Jika karena sesuatu hal tidak dapat ditempatkan pada pal batas, maka diupayakan pada kawasan hutan sekitar batas luar, sehingga masih dapat dimanfaatkan baik untuk tatabatas (untuk kawasan

hutan yang belum ditatabatas), maupun untuk rekonstruksi batas (untuk kawasan hutan yang telah ditatabatas).

Penempatan pada batas fungsi bermanfaat untuk pengelolaan baik internal Departemen Kehutanan, maupun untuk pengelolaan pihak lain diluar sektor kehutanan.

Apabila uraian diatas dihubungkan dengan hasil pemantauan 30 (tiga puluh) titik kontrol kehutanan yang telah dilakukan, berdasarkan beberapa fakta/informasi yang didapat adalah antara lain :

- Ada 3 (tiga) titik kontrol kehutanan yang berada dalam kawasan hutan dan berada di sekitar batas luar, dengan jarak terhadap batas luar kurang dari 500 meter, yaitu N 07056, N 07063, dan N 07067
- 6 (enam) titik kontrol kehutanan berada di luar kawasan hutan dan berjarak 500 meter < jarak <1500 meter terhadap batas luaryaitu N 07013, N 07020, N 07057, N 07064, N 07065 dan N 07070.
- 21 (dua puluh satu) titik kontrol berada di luar kawasan hutan dan berjarak lebih besar dari 1500 meter terhadap batas luar yaitu N 07001, N 07002, N 07004, N 07005, N 07006, N 07007, N 07008, N 07009, N 07010, N 07011, N 07014, N 07016, N 07017, N 07021, N 07023,

N 07024, N 07027, N 07059, N 07062, N 07066 dan N 07068.

Rencana Induk Pemasangan Jaringan titik kontrol/GPS Kehutanan untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah dibuat dan disetujui oleh Kepala Pusat Perpetaan Kehutanan, namun perencanaan pemasangan jaringan titik Kontrol Kehutanan masih berdasarkan Peta Tata Guna Kesepakatan (TGHK). Sejak tahun 2001 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan telah ditunjuk Kembali dengan SK Menteri Kehutanan nomor 76/Kpts-II/2001 menjadi seluas 4416.837 Ha.

Dari 30 pilar/titik kontrol kehutanan yang diamati, maka berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 3 titik kontrol Kehutanan yang posisinya di kawasan hutan atau diluar kawasan tetapi dekat (< 500 meter) dengan batas luar kawasan hutan, 6 (enam) titik kontrol berada di luar kawasan hutan dan berjarak 500 meter < jarak <1500 meter terhadap batas luar kawasan hutan dan 21 titik kontrol berada jauh di luar (>1500 m) kawasan hutan. Hal ini karena Rencana Induk pemasangan jaringan titik kontrol yan dibuat saat itu (tahun 1993) masih berdasarkan peta TGHK dan pada kegiatan awal tahun 1993, pemasangan titik kontrol tersebut dilaksanakan masih dalam rangka perapatan titik kontrol dari titik kontrol yang dipasang oleh Badan Koordinasi

dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) menuju kawasan hutan. Sehingga untuk pemasangan jaringan titik kontrol kehutanan di masa yang akan datang sebaiknya agar mengacu kepada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan yang baru dengan melakukan revisi Rencana Induk pemasangan Jaringan titik kontrol kehutanan. Sehingga pemasangan titik kontrol kehutanan berada dikawasan hutan dan dapat digunakandimafatkan sebagai titik referensi dalam pelaksanaan pengukuran / tata batas kawasan hutan dan pemetaannya, juga dalam melaksanakan inventarisasi hutan dan pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan.

## V. Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

1. Jumlah titik kontrol kehutanan yang telah dipasang di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Juni 2007 sebanyak 80 (delapan puluh) titik. Yang dipantau/dicek dilapangan adalah 30 (tiga puluh) titik
2. Dari hasil pemantauan/ pengecekan lapangan terhadap 30 pilar/titik kontrol kehutanan yang tersebar di 6 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sumatera Utara, terdapat 16 pilar/ titik kontrol kehutanan dalam kondisi baik, 12 pilar/ titik kontrol kehutanan



dalam kondisi rusak dan 2 pilar/titik kontrol kehutanan hilang/dicabut.

3. Dari hasil pengamatan berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (SK Menteri Kehutanan nomor 76/ Kpts-II/2001 ), dari 30 pilar/titik kontrol kehutanan yang dipantau, tersebar di 6 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sumatera Selatan, terdapat 3 titik kontrol Kehutanan yang posisinya didalam atau di luar kawasan hutan tetapi dekat (< 500 m) dari batas luar kawasan hutan, 6 (enam) titik kontrol kehutanan berada di luar kawasan hutan dan berjarak 500 meter < jarak <1500 meter terhadap batas luar kawasan hutan dan 21 titik kontrol kehutanan berada jauh di luar (>1500 m) kawasan hutan.

4. Rencana Induk pemasangan Jaringan titik kontrol/GPS Kehutanan untuk Provinsi Sumatera Selatan masih berdasarkan Peta Tata Guna Kesepakatan (TGHK).

5. Pemanfaatan pilar/titik kontrol kehutanan belum optimal.

Titik kontrol kehutanan yang berada di sekitar batas luar kawasan hutan dapat dimanfaatkan sebagai titik referensi dalam kegiatan pengukuran batas kawasan hutan (untuk yang belum ditatabatas),



untuk rekonstruksi (untuk yang sudah ditatabatas) dan untuk koreksi peta / citra.

Titik kontrol yang berada di luar kawasan hutan masih dapat dimanfaatkan untuk aplikasi kehutanan bila jaraknya terhadap lokasi kegiatan masih dalam batas-batas toleransi.

Titik kontrol yang berada jauh di luar kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan lain diluar sektor kehutanan.

#### B. Saran / Rekomendasi

1. Terhadap 12 pilar/titik kontrol kehutanan yang dalam kondisi rusak (pilar terkelupas, sumpal dan identitas pilar/breskepnya hilang ) perlu diperbaiki.
2. Terhadap 2 pilar/titik kontrol kehutanan yang hilang/dicabut, untuk yang

berada diluar kawasan hutan disarankan untuk diganti tetapi dipasang di posisi yang mendekati/di kawasan hutan.

3. Rencana Induk pemasangan Jaringan titik kontrol/GPS Kehutanan untuk Provinsi Sumatera Selatan agar segera direvisi berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (SK Menteri Kehutanan nomor 76/ Kpts-II/2001 ).
4. Perlunya sosialisasi keberadaan Jaringan titik kontrol kehutanan kepada masyarakat dan Instansi pengguna titik referensi agar pemanfaatannya bisa optimal.

# Pembangunan Provinsi Maluku Sebagai Model Pembangunan Provinsi Kepulauan

Oleh:  
Endang Indriati S  
Perencana Muda,  
Direktorat  
Tata Ruang dan  
Pertanahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah ribuan pulau serta kekayaan sumberdaya alamnya merupakan aset yang sangat potensial untuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Kekayaan sumberdaya alam Indonesia berupa sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources) seperti ikan, mangrove, terumbu

karang, dan kekayaan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih (non-renewable resources) seperti minyak bumi, gas, dan mineral. Kekayaan lainnya yang bernilai ekonomi adalah potensi yang bersumber dari jasa kelautan seperti transportasi laut, industri maritim dan wisata bahari.

Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang unik, dimana wilayah lautannya jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Dari total luas wilayah Provinsi ini, yaitu 712480 km persegi, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan hanya 7,6% daratan. Menurut data citra landsat Provinsi Maluku memiliki jumlah pulau 1412, dengan panjang garis pantai 10.662,92 kilometer. Perairan Maluku dilalui oleh 3 alur kepulauan Indonesia (ALKI).

Dari bentuk alamnya, Provinsi Maluku dapat digolongkan kedalam suatu ekosistem lautan (marine ecosystem), yang sangat berpengaruh terhadap potensi pengembangan sumber alam dan jasa lingkungan yang dapat disediakan oleh suatu ekosistem kepulauan seperti ini.



Maluku, sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah lautnya yang sangat besar, membutuhkan prasarana transportasi intra dan antar pulau untuk kelancaran arus lalu lintas manusia dan barang.

Secara umum, Provinsi Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang berbeda dengan provinsi kepulauan lainnya, seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perbedaan karakteristik tersebut selain wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya, juga beragamnya sumberdaya alam yang tersedia sesuai dengan tipologi wilayah pulau satu dengan lainnya.

### Potensi Sumberdaya Alam Di Maluku

Maluku sebagai Provinsi kepulauan, dimana wilayah lautannya jauh lebih luas dari wilayah daratan. Meskipun luas daratannya kurang dari 10% dari luas lautannya, namun kekayaan potensi sumberdaya alam di wilayah daratan juga tidak kalah dengan kekayaan sumberdaya di wilayah laut. Ini bisa dilihat bahwa hingga kini sektor pertanian, terutama sub-sektor perkebunan merupakan primadona mata pencaharian masyarakat di Maluku. Ditambah lagi dengan sumberdaya kelautan, yang karena luas wilayahnya 9 kali lebih besar dari daratannya, maka ini merupakan peluang yang lebih besar lagi sebagai sumber utama penghasilan masyarakat.

### Sumberdaya Perkebunan

Perkebunan di Provinsi Maluku merupakan sub-sektor yang telah terbukti sejak dulu hingga sekarang menjadi andalan dalam peningkatan kesejahteraan

petani, penyediaan lapangan kerja, pendapatan daerah, bahkan juga devisa negara. Bisnis komoditas perkebunan ini sejak dulu, terutama rempah-rempah dan kelapa, telah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan potensi wilayahnya, di Provinsi Maluku terdapat lima komoditi utama perkebunan, yaitu: kelapa, cengkeh, pala, kakao, dan kopi. Perkembangan terakhir, dari kelima komoditi tersebut kelapa dan kakao mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. Kebutuhan energi nabati dan semakin berkembangnya agroindustri terpadu kelapa telah menyebabkan semakin baik prospek pengembangannya. Kakao lazim ditumpangsarikan dengan kelapa. Selain itu, kakao merupakan komoditas unggulan dalam Program Revitalisasi Perkebunan bagi kawasan Timur Indonesia.

### Sumberdaya Perikanan

Perairan laut Banda memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 248.400 ton per tahun, laut Seram dan sekitarnya sebesar 587.000 ton per tahun, dan laut Arafuru sebesar 792.100 ton per tahun. Dengan demikian, total potensi produksi dari ketiga perairan laut utama Provinsi Maluku ini diperkirakan mencapai 1.627.500 ton per tahun. Potensi produksi tersebut terdiri dari ikan palagis besar 261,6 ton, ikan palagis kecil 979,5 ton, ikan demersal 339,9 ton, udang 422,7 ton, cumi-cumi 110,5 ton dan ikan karang 812 ton. Provinsi ini

juga memiliki potensi ikan hias yang bisa mencapai produksi ribuan ekor per tahun.

Dari keseluruhan potensi sumberdaya perikanan tangkap tersebut, ternyata tingkat pemanfaatannya sampai dengan tahun 2001 baru mencapai 322.444 ton atau 19,81% dari potensi yang ada. Dengan demikian perairan Maluku sebetulnya masih belum tereksploitasi (under exploited), sehingga memiliki peluang untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.

Selain potensi perikanan tangkap, Provinsi Maluku juga memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar, yang terdiri dari budidaya laut 717.899 ha dan budidaya air payau 23.200 ha. Komoditas unggulan untuk budidaya laut adalah rumput laut, ikan karang (ikan kerapu, ikan napoleon, ikan kakap putih dan ikan hias), udang lobster, teripang, abalone dan kerang mutiara. Komoditas unggulan untuk budidaya air payau adalah udang windu, udang vannamei, ikan bandeng dan rumput laut jenis *Gracilaria*.

### Sumberdaya Pariwisata

Maluku dengan luas perairannya yang lebih dari 90% wilayah, dengan 1.340 pulau, dan pantai sepanjang kurang lebih 10.630 km pasti memiliki potensi wisata bahari yang kuat. Provinsi ini juga kaya akan biota laut dan darat, yang sebagian diantaranya merupakan hewan yang bermigrasi secara internasional, terutama di kawasan Pasific, sehingga Maluku juga memiliki





potensi ekowisata yang kuat.

Selain itu, Maluku telah menjadi daerah tujuan perjalanan eksplorasi dan perdagangan sejak abad 14, sehingga provinsi ini memiliki potensi kuat untuk dikembangkan dalam bentuk wisata sejarah atau Nostalgic Tourism. Seluruh kekuatan pariwisata Maluku tersebut didukung oleh kekayaan budaya yang masih tetap hidup di masyarakat dan living culture ini memberikan daya tarik luar biasa sebagai wisata budaya bagi wisatawan mancanegara, terutama dari kawasan Eropa.

Masing-masing gugus pulau di Maluku ternyata memiliki potensi pariwisata dengan tema-tema yang berbeda satu sama lain. Potensi kepariwisataan di masing-masing gugus pulau tersebut telah dikaji, bahkan tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, yaitu:

1. Gugus pulau Ambon, Lease dan Banda memiliki potensi pariwisata bertema: "Marine and Heritage Tourism" (wisata alam bahari, pantai dan sejarah).
2. Gugus kepulauan Kei dan kepulauan Aru memiliki potensi pariwisata bertema: "Marine, Culture, Heritage, Special Natural Tourism" (wisata alam pantai, bahari, budaya hutan dan sejarah).
3. Gugus kepulauan Tanimbar, Babar, dan pulau-pulau terselatan memiliki potensi pariwisata bertema: "

Marine, Culture and Flora/Fauna Exploration Tourism" (wisata alam, bahari, budaya dan alam hutan).

4. Wilayah pulau Seram memiliki potensi pariwisata bertema: "Special Natural Tourism, Flora/Fauna, Cave Exploration, Marine and Culture Tourism" (wisata alam hutan, bahari, gua, dan budaya).
5. Wilayah pulau Buru memiliki potensi pariwisata bertema: "Agro, Water and Culture Tourism" (wisata agro, alam tirta dan budaya)

#### **Permasalahan Pembangunan Provinsi Kepulauan Maluku**

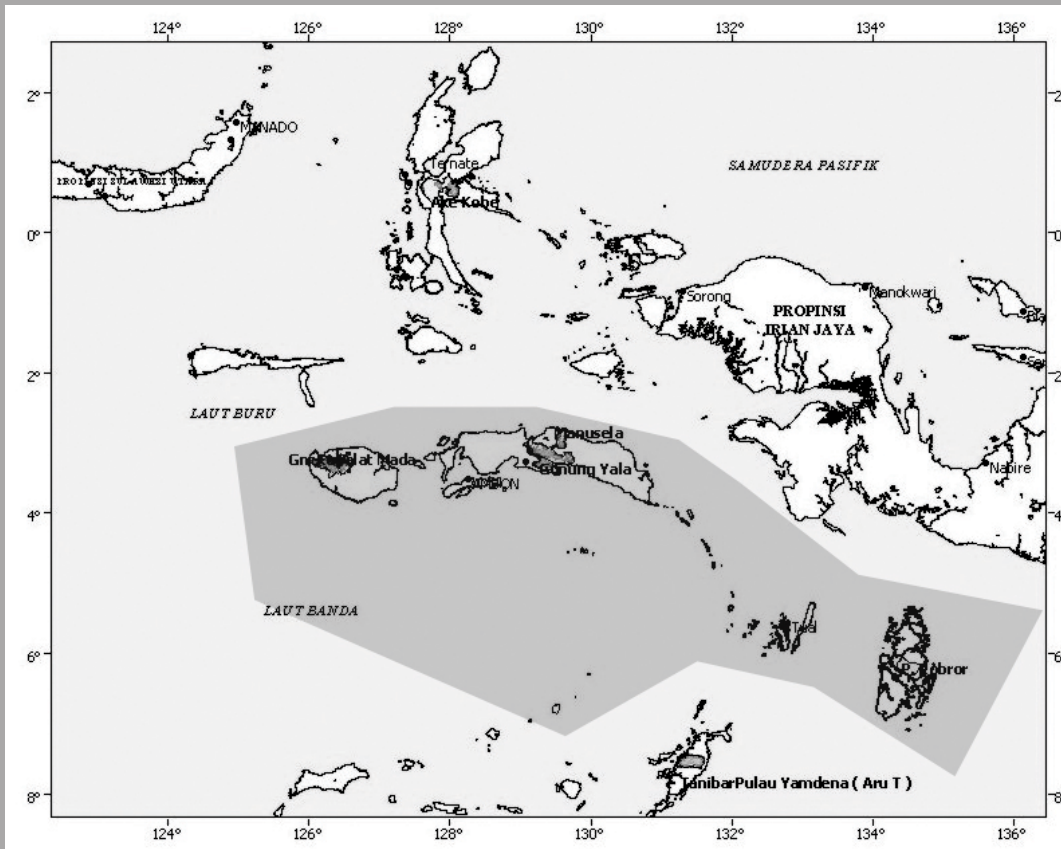
Meskipun Provinsi Maluku memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar sebagaimana tersebut diatas, namun seperti halnya provinsi kepulauan pada umumnya, maka khusus pada Provinsi Maluku ini masih banyak ditemukan permasalahan pembangunan yang berkembang secara umum, terutama karena masih rendahnya pemihakan Pemerintah terhadap pembangunan wilayah kepulauan. Selama ini belum ada kebijakan pemerintah yang jelas berupa pemihakan terhadap pembangunan wilayah kepulauan serta belum optimalnya kerangka regulasi dan kerangka anggaran (dana perimbangan maupun bagi hasil) untuk meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas wilayah kepulauan yang terpencil dan terisolir.

Meskipun wilayah lautnya sangat luas dengan kekayaan sumberdaya perikanan yang sangat besar, namun karena masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola sumberdaya kelautan tersebut, serta belum tersedianya sarana dan prasarana pendukungnya sehingga nilai tambah komoditas kelautan tersebut belum dapat dinikmati oleh masyarakat Maluku. Hal ini dicerminkan oleh banyaknya hasil tangkapan ikan di wilayah Maluku yang dibawa dan diolah ke wilayah yang memiliki infrastruktur yang memadai seperti di Bitung (Sulawesi Utara) dan Surabaya.

Dengan terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, baik aparatur maupun masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya laut dan darat di provinsi ini (perkebunan, perikanan, pariwisata), maka potensi yang tersedia tersebut belum dapat terkelola secara optimal. Apabila dibandingkan dengan sektor lain seperti perhotelan dan perdagangan, sektor perikanan dan pariwisata di Maluku masih memiliki tingkat ketrampilan dengan tenaga kerja yang relatif rendah.

Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan telah mengakibatkan tingginya biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Terbatasnya infrastruktur transportasi di provinsi ini menyebabkan rendahnya aksesibilitas wilayah. Hal ini antara lain tercermin dari tingginya biaya transportasi





Maluku, merupakan provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, dimana luas daratannya kurang dari 10% dari luas lautannya. Karena itu, provinsi ini memiliki kekayaan sumberdaya kelautan yang sangat potensial.

antar wilayah sehingga pola perekonomian masyarakat tetap berskala kecil karena akses informasi dan pemasaran yang terbatas. Hal ini menyebabkan kurang berminatnya para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah yang sebenarnya memiliki potensi sumberdaya yang besar. Selain itu, dengan wilayah laut yang luas dan memiliki wilayah perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia, serta terbatasnya sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum untuk mengamankan laut, menyebabkan kegiatan-kegiatan illegal (illegal fishing, illegal

trading, illegal minning, dan lain-lain) belum dapat diatasi. Di Provinsi Maluku juga terlihat disparitas antar-wilayah karena adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang disebabkan arah kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan dengan mengabaikan pemerataan. Selama ini prioritas kebijakan pembangunan masih berorientasi pada pulau-pulau besar (mainland), sementara itu pulau-pulau kecil disekitarnya cenderung terabaikan. Disamping itu, kebijakan yang berorientasi sektoral lebih

ditunjukkan dibanding dengan pendekatan yang berorientasi regional.

### Perlunya Perubahan Paradigma Pembangunan

Ada suatu kaidah yang berlaku dalam sistem penataan ruang, yang mengatakan bahwa jumlah potensi sumberdaya alam dan keanekaragamannya sebanding dengan luasan ruangnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ruang lautan yang luas di Maluku itu mempunyai potensi sumberdaya alam dan potensi layanan lingkungan yang lebih besar daripada daratannya.



Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan

Ketersediaan ruang lautan memberikan potensi manfaat ruang untuk berbagai pembangunan, antara lain perikanan tangkapan laut, budidaya perairan laut, kawasan potensi tujuan wisata, pelayanan jasa transportasi dan komunikasi, potensi energi gelombang dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), ruang pesisir untuk pemukiman dan industri, pertambangan dasar laut, dan sebagainya.

Dengan demikian, laut memang menyimpan potensi yang luar biasa besarnya dan nilai strategis, sehingga perlu merubah paradigma pembangunan dan melakukan reorientasi konsep pembangunan, dari pembangunan yang berbasis sumberdaya daratan (land-basis) menuju pembangunan yang berbasis sumberdaya kelautan

(marine-basis). Alasan kuat yang melatarbelakangi reorientasi tersebut adalah:

1. Amandemen ke-2 Pembukaan UUD 45 telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
2. Sumberdaya kelautan termasuk perikanan, merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources), asal pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana.
3. Terdapat keterkaitan yang kuat (backward and forward linkage) antara pengembangan potensi kelautan dengan sektor industri dan aktifitas ekonomi lainnya seperti industri perikanan, industri pariwisata bahari, industri pertambangan,

jasa perhubungan dan transportasi serta sebagai sumber ilmu pengetahuan kelautan (oceanology).

4. Melalui laut dapat ditemukan keanekaragaman sosial budaya yang telah berabad-abad umurnya, dimana masyarakatnya menjadikan laut sebagai sumber penghidupan dan mempersatu antar suku, agama dan ras di wilayah kepulauan.
5. Secara geopolitis dan geostrategis, wilayah laut memiliki peran penting bagi kedaulatan sebuah wilayah serta pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu harus ada perubahan dalam memandang kedudukan kawasan laut dan kepulauan, misalnya



“ Provinsi Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dan memiliki kekayaan sumberdaya alam yang besar, maka arah kebijakan utama yang dibutuhkan adalah penetapan kebijakan baru yang berpihak pada pembangunan yang berorientasi kepulauan ”



kita seharusnya menganggap bahwa laut hanya sebagai batas administrasi (provinsi, kabupaten, kecamatan), namun tetap laut itu adalah pemersatu wilayah. Memang pulau-pulau adalah tempat bermukim yang aman, namun laut disekitarnya adalah penyedia sumber penghidupan, dan sebagai jalur lalu lintas penghubung antar-daerah, antar-pulau, bahkan antar-budaya.

### **Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan**

Dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dan memiliki kekayaan sumberdaya alam yang besar, maka arah kebijakan utama yang dibutuhkan adalah penetapan kebijakan baru yang berpihak pada pembangunan yang berorientasi kepulauan. Selama ini, orientasi dan paradigma pembangunan lebih menekankan pada pembangunan daratan dengan tidak mempertimbangkan wilayah pulau-pulau kecil yang terisolir. Untuk itu, penetapan kebijakan

baru tersebut memerlukan konsep sistem tata ruang yang berbasis kelautan, dimana kebijakan peraturan daerahnya menjadikan wilayah lautnya yang luas sebagai kawasan strategis pembangunan.

### **Pembangunan Sarana dan Prasarana Ttransportasi**

Transportasi merupakan sistem infrastruktur untuk menyediakan akses bagi ruang dan penghuninya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Transportasi juga dapat menjadi pendorong atau pengakomodasi pertumbuhan ekonomi sesuai kondisi wilayah yang dilayani. Untuk itu, jaringan transportasi harus mampu menyediakan akses bagi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, efisien, terjangkau dan aman bagi lingkungan. Selain itu, pengembangan jaringan transportasi dalam jangka panjang harus berlandaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Mengingat secara geografis, Maluku merupakan provinsi kepulauan, dimana wilayah lautnya sangat luas, maka

pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mengutamakan transportasi laut sebagai moda utama, sedangkan moda transportasi darat sebagai penunjangnya (feeder), serta moda transportasi udara sebagai angkutan jarak jauh. Ketiga jenis moda transportasi ini harus saling terintegrasi satu sama lain, sehingga terbentuk sistem transportasi yang efisien dan efektif di provinsi kepulauan Maluku.

### **Pembangunan Sarana Prasarana Sosial, Ekonomi Dan Keamanan**

Sebagaimana diketahui kondisi kepulauan Maluku memiliki beberapa gugus pulau, bahkan ada beberapa pulau kecil yang terisolir. Sama halnya dengan

“ Pemerintah Daerah sebaiknya merumuskan kebijakan baru untuk pengembangan ekonomi daerah yang lebih terfokus, terukur, konsisten, dan saling sinkron antar - sektornya ”



penduduk yang tinggal di pulau yang lebih besar, maka penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil tersebut juga membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang perlu didukung oleh kemudahan akses terhadap infrastruktur dasar seperti transportasi, informasi, listrik, sanitasi dan air bersih.

Keberadaan dan kemudahan akses terhadap infrastruktur dasar tersebut diatas bukan hanya dapat mendukung kegiatan sosial masyarakat, tapi juga dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang terkait dengan produktifitas produksi. Khusus untuk membangun perekonomian di provinsi Maluku perlu langkah-langkah strategis seperti: pembangunan

pasar-pasar, pembangunan jaringan distribusi pemasaran, pembangunan pelabuhan laut dan udara, peningkatan promosi investasi, baik ditingkat nasional maupun internasional, peningkatan fasilitas listrik di wilayah kepulauan, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pembangunan SPBU nelayan di pulau-pulau terpencil.

Masih maraknya kegiatan ilegal (illegal fishing dan illegal trading) yang terjadi di kawasan laut Maluku disebabkan karena masih lemahnya sarana prasarana, kualitas dan kinerja aparat penegak hukum di laut. Untuk mengatasi hal itu perlu ditingkatkan kualitas armada penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

armadanya untuk melakukan patroli. Selain itu armada nelayan juga perlu dikuatkan agar para nelayan merasa memiliki sumberdaya yang terkandung di laut, dan apabila mereka melihat ada kegiatan ilegal di wilayah lautan, mereka mampu mengusir.

### Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif

Investasi merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Investasi akan mengalir kepada wilayah atau negara apabila lingkungan bisnisnya sehat dan didukung oleh iklim usaha yang kondusif. Menurut Bank Dunia dan The World Economic Forum (2005) ada beberapa faktor utama yang menghambat investasi, yaitu: birokrasi yang tidak efisien, kondisi infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan. Selama ini di Provinsi Maluku banyak pungutan, pajak, sumbangan sukarela, serta pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan pebisnis, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga karena buruknya kondisi infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, dan masalah pelayanan kelembagaan publik yang terkait dengan lamanya urusan perijinan dan rumitnya birokrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Maluku



yang berbasis kepulauan, Pemerintah Daerah sebaiknya merumuskan kebijakan baru untuk pengembangan ekonomi daerah yang lebih terfokus, terukur, konsisten, dan saling sinkron antar-sektornya. Selain itu, masih harus didukung beberapa langkah, seperti:

- a. Penyediaan infrastruktur dasar sebagai pendukung kegiatan perekonomian daerah, terutama infrastruktur transportasi intra dan antar pulau untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas manusia dan barang.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur perijinan serta transparansi biaya perijinan melalui mekanisme pelayanan satu atap.
- c. Penghapusan berbagai retribusi, pungutan, dan Peraturan Daerah yang tumpang tindih dan memberat dunia usaha, termasuk juga pemberantasan korupsi dan pungutan liar dalam sistem birokrasi daerah.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia lokal agar mampu mengelola kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga multiplier effect dari komoditas tersebut dapat dinikmati oleh penduduk lokal.

### Kesimpulan

Dengan menyadari kenyataan yang ada bahwa Indonesia umumnya dan Provinsi Maluku khususnya adalah wilayah maritim, maka sudah seyogyanya kita melakukan reorientasi terhadap paradigma pembangunan ke arah pembangunan kemaritiman yang berorientasi kepulauan. Kita jangan lagi memperlakukan laut sebagai back-yard, halaman belakang dimana kita biasanya membuang sampah, tapi kita harus memperlakukannya sebagai front-yard, halaman depan yang kita hargai sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan orientasi pembangunan baru ini serta tetap berkonsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur di berbagai aspek baik ekologis, ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Secara ekologis, sumberdaya alam yang terkandung di laut dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebihan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resource) dapat dibarengi dengan upaya untuk mengembangkan bahan pendukungnya secara memadai.

Secara ekonomis, pembangunan berkelanjutan harus mampu meningkatkan pengembangan industri dan jasa maritim bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara sosial budaya dan politik, pembangunan harus mampu menjunjung tinggi harkat manusia dan rasa adil yang mampu menumbuhkan semangat cinta laut, membangun tradisi dan penghidupan masyarakat maritim serta menjadikan laut sebagai penghubung dan pemersatu bangsa.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, pembangunan harus mampu menjamin tegaknya kedaulatan di seluruh wilayah laut dan laut yurisdiksi nasional, serta keutuhan dan kedaulatan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### Referensi:

1. Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman Js. Pengembangan Potensi Sumberdaya Unggulan di Maluku (Perikanan, Perkebunan, Pariwisata)
2. Ir. Suyono Dikun PhD. Kerangka Konseptual Pengembangan Sistem Infrastruktur Provinsi Maluku
3. Prof. Dr. Bambang Brojonegoro Pengembangan Ekonomi Regional Provinsi Maluku
4. Dr. Ir. Tjuk Sukardiman Pengembangan Transportasi Laut di Maluku
5. Dr. Ir. Indrayati Subagio DEA Pengembangan Transportasi Darat di Maluku
6. Capt. (Pnb) Sunaryo Pengembangan Transportasi Udara di Maluku
7. Prof. Dr. Sudirman Yahya Pengembangan Sumberdaya Perkebunan di Maluku
8. Prof. Dr. Kadarwan MSc. Pengembangan Sumberdaya Perikanan di Maluku
9. Ir. Sinda Titaley Pengembangan Sumberdaya Pariwisata di Maluku
10. Ir. Bambang Prijambodo MA. Pembangunan Ekonomi Makro Maluku
11. Drs. Oktorialdi MA. PhD. Pengembangan Ekonomi Mikro di Maluku
12. Elya G Muskitta Msi. Pengembangan Industri Unggulan Berbasis Klaster Untuk Menciptakan Economic Convergence di Provinsi Kepulauan

## Hasil Pembangunan Adalah Buah Dari Kerja Keras Beberapa Tahun Sebelumnya



### Ir.Ferrarius Sugiono, M.Sc Perencana Utama Bappenas

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Perencana bukan lah semata-mata orang yang terpinggirkan oleh situasi atau keadaan dalam lingkungan kerja, akan tetapi lebih pada sebuah pilihan yang diambil berdasarkan kemampuan ataupun keahliannya pada suatu bidang tertentu, Jabatan ini memang masih kurang populer dan kurang memiliki nilai prestise yang bisa di banggakan bagi para pegawai negeri bila di dibandingkan dengan Jabatan struktural yang secara pendanaan dan SDM sangat diuntungkan oleh sistem birokrasi yang ada di lingkungan instansi kita masing-masing. Oleh karena itu banyak dari kita para pegawai negeri umumnya sedikit malas bila harus mengambil jalur alternatif ini dalam berkariernya, di samping kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung juga di haruskan mengoptimalkan kemampuannya sendiri, akan tetapi tidak demikian bagi seorang Ir. FSugiono. Msc yang telah memilih Jabatan Fungsional Perencana dalam kelanjutan kariernya sebagai PNS di lingkungan Kementerian Negara Bappenas, hingga mencapai karier puncak sebagai perencana utama dan satu-satunya di Indonesia.

Pada edisi kali ini tim simpul berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau untuk berbagi pengalamannya selama dua tahun ini hingga menjadi perencana utama dan mencoba memberikan masukan serta saran kepada para Fungsional Perencana di seluruh Indonesia. tim simpul yang di wakili oleh Sdr. Dwiputro dan Hendra Yudianto sebagai fotografer di terima beliau di ruang kerjanya di lingkungan Kementerian Negara Bappenas. Berikut ini hasil bincang-bincang kami dengan bapak Ir. FSugiono.Msc

Nama : Ir.Ferrarius Sugiono, M.Sc  
 NIP : 350000323  
 Pangkat (golongan) : Pembina Utama Madya (IV/d)  
 T.T.L : Blitar / 5 April 1952  
 Agama : Katholik  
 Jabatan : Perencana Utama  
 Alamat : Komplek Bappenas No.C-5  
 Jl.Siaga Raya Jakarta  
 12510  
 Telepon : 7970293

#### Riwayat pendidikan formal :

- Sekolah Dasar "Yos Soedarso" di Blitar, lulus tahun 1964.
- Sekolah Menengah Pertama Negeri II Blitar, lulus tahun 1967.
- Sekolah Menengah Atas Negeri I Blitar, lulus tahun 1970.
- Fakultas Teknik Perkapalan ITS Surabaya, lulus sarjana teknik tahun 1979.
- World .Maritime University Malmo Sweden, jurusan Port and Shipping Management, lulus Master of Science tahun 1987.



**Apa yang dulu mendasari bapak untuk memilih Jabatan Fungsional Perencana sebagai lanjutan karier bapak di PNS?**

Pada bulan September 2005 saya dipanggil Bapak Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas. dan diberitahu bahwa saya akan diganti oleh Staf saya, beliau menanyakan apakah saya berkeberatan. Saya jawab bahwa jabatan itu hanya suatu kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. dimana sewaktu waktu dapat diambil kembali, saya sedikitpun tidak keberatan. Mendengar jawaban saya Bapak Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas lalu menanyakan sekarang anda minta apa? Pada waktu itu saya hanya meminta supaya diberikan tempat/ruangan, karena bagi yang sudah tidak mempunyai jabatan lagi selalu dilupakan oleh Bagian Umum. Setelah itu beliau menanyakan anda mau menjadi Widyaiswara atau Jabatan Fungsional Perencana. saya langsung menjawab karena saya sejak menjadi abdi negara sebagai perencana saya pilih menjadi fungsional perencana. Akhirnya sejak 1 Oktober 2005 saya ditetapkan sebagai Perencana Madya, dimana sesuai dengan kepangkatan saya semestinya sudah sebagai Perencana Utama. Tetapi sesuai peraturan yang ada untuk menduduki Jabatan

Perencana Utama harus lulus uji kompetisi terlebih dahulu

**Menurut bapak apa yang menjadi daya tarik dari itu semua?**

Pertama-tama yang menjadikan daya tarik saya sebagai perencana adalah pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1980 adalah sebagai perencana. Kedua sejak era reformasi dan kebijakan otonomi daerah fungsi perencanaan pembangunan banyak yang dilupakan. baik ditingkat pusat apalagi ditingkat daerah. Teman-teman sudah banyak yang memfokuskan hanya pada rencana penggunaan APBN. padahal semua menyadari bahwa dana APBN maksimal hanya mampu menampung 20 % dari rencana pembangunan, sejak dahulu sisanya dilakukan oleh investor swasta dan BUMN. Pada sisi yang lain RPKM ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan alokasi per tahun RKP ditetapkan melalui Undang-Undang yang ditetapkan oleh DPR. sehingga sering terjadi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Sehubungan dengan itu saya sepertinya terpanggil untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman perlunya menyusun perencanaan secara bersama baik ditingkat pusat maupun daerah.





Suasana akrab reporter simpul saat mewawancarai bapak sugiono

**Bisakah bapak menceritakan perjalanan karier bapak dari awal saat bapak memilih Jabatan Fungsional Perencana hingga akhirnya menjadi Perencana Utama?**

Berbicara masalah perjalanan karier sebagai fungsional perencana tentunya belum terlalu banyak, karena saya menjabat fungsional perencana baru 2 tahun 3 bulan. Tetapi ada baiknya saya sampaikan perjalanan hidup JFP saya mungkin dapat dijadikan cermin bagi teman-teman JFP lainnya. Secara kedinasan tantangan pertama yang saya hadapi adalah mengikuti ujian kompetensi Perencana Utama, mengingat masalah ini baru yang pertama kali dilakukan untuk Perencana Utama. Bappenas sebagai instansi pembina JFP belum mempunyai Tim Penguji, sehingga harus di berikan kepada Perguruan Tinggi yang sudah mampu melakukan pengujian. Dari sisi pelaksanaan ada kendala tentang standar unit biaya pelaksanaan per orang, artinya tim penguji pada saat itu dapat melaksanakan bila minimal pesertanya 5 orang, kalau hanya seorang tim penguji tetap mengusulkan biaya sebesar untuk 5 orang. Berkat bantuan dan niat yang baik Bapak Dedy S.Priatna dan Bapak Dida semua biaya dapat disediakan, sehingga saya pada pertengahan tahun 2006 dapat mengikuti ujian tersebut. Dari sisi materi ujian, pada saat hari pertama saya bertemu tim penguji dari Universitas Gajah Mada terjadi dialog yang cukup serius, pihak penguji berpendapat bahwa seorang perencana utama harus mengetahui A sampai Z proses pembangunan untuk semua sektor, saya katakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak mungkin mengetahui semua sektor secara detail yang saya ketahui tentunya bidang saya yaitu sektor transportasi, tetapi secara makro keterkaitan sektor transportasi dengan sektor lainya tentu saya harus tahu. Akhirnya tim

penguji setuju dan menugaskan saya melakukan studi lapangan di daerah Yogya dan mengevaluasi tentang pembangunan infrastruktur transportasi. Berkah dari almarhumah ibunda tercinta saya yang wafat pada tanggal 2 Maret 2006 dan doa teman-teman semua saya lulus ujian dan per tanggal 1 Desember 2006 melalui Keputusan Presiden saya menjadi Perencana Utama yang pertama kali di Indonesia. Dari sisi pelaksanaan tupoksi JFP masih banyak yang harus dibenahi, baik yang bersangkutan dengan pemahaman para teman-teman JFP sendiri tentang peraturan yang ada maupun bagi teman-teman struktural sebagai managerial pelaksanaan tugas. Diluar kedinasan terus terang saya mengalami kebebasan dalam membantu pihak-pihak lain (swasta) dalam rangka pembangunan dan operasional infrastruktur transportasi. Mereka banyak berdialog dengan saya karena salah satunya saya tidak pasang tarip, dan mereka bebas memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah karena mereka berpikiran bahwa fungsional perencana harus independen dan mau menerima kritik dan saran.

**Sejauh mana menurut bapak peran dari pimpinan dan instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana ini dalam memberikan dukungan bagi pengembangan karier bapak sebagai Fungsional Perencana?**

Secara pribadi perhatian pimpinan Bappenas menunjukkan perkembangan yang cukup baik, masalah ini dapat dibuktikan sejak 1 Agustus 2007 saya dipindahkan dari lingkungan Sekretariat Kementerian ke Kedeputan Sarana dan Prasarana, artinya untuk mempermudah dan memperlancar pembagian tugas sehari-harinya sesuai dengan latar belakang profesi saya, tetapi secara umum, masih perlu dilakukan sosialisasi dan penetapan aturan





main dalam melaksanakan tupoksi perencanaan antara JFP dengan pejabat struktural. agar optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dapat dicapai. Masalah ini terutama bagi JFP di luar Bappenas dan lebih-lebih di daerah, karena masih banyak Gubernur, Bupati, Walikota dan para Ketua Bapeda yang belum mengetahui apa itu JFP.

**Sementara itu apakah dukungan sarana dan prasarana yang bapak terima sangat membantu bagi karier bapak?**

Masalah dukungan prasarana dan sarana merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. mengingat pengertian dan pemahaman hak dan kewajiban sesama pegawai negeri masih saja menjadi permasalahan. Khusus bagi saya pribadi karena sudah terbiasa dari sejak menjadi PNS. pegawai Bappenas harus mampu bekerja seperti pasukan komando. jadi saya sudah terbiasa dengan swakelola kebutuhan saya. Teman-teman baik saya masih banyak yang membantu. mulai dari makan minum bersama sampai dengan kerja bersama.

Untuk mengantisipasi semua itu, langkah apa yang bapak ambil serta saran yang dapat bapak berikan agar para Fungsional dapat tetap eksia di jalur ini Masalah ini sesuatu yang tidak mudah. Mengingat setiap individu mempunyai karakter yang berbeda. ada yang mempunyai atensi besar ada yang cuek (emang gue pikirin). ada yang progresif revolusioner dan ada yang “alon-alon asal kelakon” Bagi saya karena sudah lulus kesabaran saya akan terus berupaya melakukan dialog dengan teman-teman bagaimana dapat menyelesaikan tupoksi perencana dengan baik dan menghasilkan outcome yang maksimal, baik untuk masyarakat banyak maupun pribadi. kebutuhan pribadi dan masyarakat banyak tidak boleh terlupakan harus seimbang.

Untuk itu saran saya adalah yang Pertama tetapkan aturan main dalam menjalankan tupoksi perencanaan antara pejabat fungsional perencana dengan pejabat struktural sebagai pemegang fungsi manajerial. hindarkan tenggang rasa antara JFP Senior dengan para pejabat struktural. berlakulah seperti Guru Besar dengan para

Rektor dan Dekan di perguruan tinggi. Khusus untuk kepentingan teman-teman JFP di daerah, Bappenas sebagai instansi pembina perlu segera melakukan sosialisasi .JFP ke para pimpinan di daerah. Kedua percepatlah proses penetapan batas usia pensiun para JFP. masalah ini bukan semata-mata hanya untuk pegawai negeri Bappenas tetapi lebih kepada para pejabat fungsional perencana dilingkungan instansi pusat dan daerah. Saya mempunyai keyakinan bila masalah Batas Usia Pensiun ini terselesaikan paling tidak dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk berupaya dengan segala macam cara untuk menduduki jabatan struktural. Ketiga tingkatkan kesejahteraan seluruh pegawai negeri tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan diikuti dengan peningkatan disiplin tanpa tebang pilih

**Pesan atau kiat apa yang bisa bapak sampaikan kepada para Perencana atau para Fungsional di seluruh Indonesia ?**

Bagaimanapun juga perencanaan yang baik adalah hasil kerjasama semua stakeholders. masing-masing pihak mempunyai peran yang sama dalam menciptakan urutan prioritas pembangunan. khusus bagi para perencanaan di daerah, andalah yang paling tahu kondisi di daerah sehingga data, potensi. kemampuan serta kebutuhan yang mendesak dapat diberikan dengan benar. Selanjutnya marilah kita hidupkan kembali kerjasama antar instansi perencana pusat dan daerah untuk mencapai tujuan masyarakat banyak Selain itu yang sangat penting pada saat ini marilah bersama-sama meyakinkan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan hasil perencanaan. baik perencanaan tahunan. jangka menengah maupun jangka panjang. Perlu kita tanamkan pengertian bahwa **hasil pembangunan tersebut baru dapat dinikmati buahnya setelah beberapa tahun. hindari keinginan hari ini baru menanam besok mau panen hasilnya.** Masalah penting lainnya yang menjadi tanggung jawab kita adalah **mendorong kepastian investasi oleh pihak swasta, jangan semata-mata tergantung kepada APBN maupun APBD. (Simpul)**

# Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Perencana Tahun 2007



Proses penilaian prestasi kerja pejabat perencana ke dalam Angka Kredit dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit. Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya, Tim Penilai Angka Kredit terdiri atas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Dalam upaya menjamin tingkat profesionalitas dan objektivitas Tim Penilai Angka Kredit Perencana dalam melakukan penilaian, pembentukan kompetensi, penyamaan visi dan dinamika pola, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keahlian, perlu dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Perencana.

Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana adalah pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi anggota atau calon anggota tim penilai dari pejabat struktural maupun para pejabat perencana yang berpotensi untuk menjadi anggota tim penilai di tingkat Pusat, Instansi, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tujuan penyelenggaraan Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana adalah :

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap Penilaian Angka Kredit Perencana
2. Meningkatkan keterampilan dan perilaku peserta dalam penilaian angka kredit Perencana
3. Meningkatkan peran dan tanggung jawab peserta sebagai calon dan atau anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana

Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana tahun 2007 dilaksanakan di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta pada tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 2007 diikuti oleh 22 peserta dari berbagai Instansi di seluruh Indonesia. Adapun peserta Diklat adalah sebagai berikut:

### Peserta Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana tahun 2007

No	Nama	Jabatan/Gol	Instansi
1.	Abdullah Shobri, SE	IIIId/Kasub.bag Perencanaan	ARSIP NASIONAL RI
2.	Susiana Yustrida, SE	IIIc / Perencana Muda	Departemen Perhubungan
3.	Ir. Watty Karyati Roekmana,	IVa / Perencana Madya	Badan Planologi Kehutanan , Dep. Kehutanan, Jakarta
4.	Ir. Danny Bastian	IIIc/ Perencana Muda	Bappeda , Pemprov. Jatim
5.	Parno, S.IP	Kasubbag Penilaian Angka Kredit	Badan Pusat Statistik, Jakarta
6.	Drs. Eka Komara	IIIId / Perencana Muda	Bappeda, Pemkab. Kuningan
7.	Drs. Indrafelli	IIIc/ Kasubbag. Kepegawaian	BKD, Pemkot.Solok
8.	Drs. Irianto Puji Waluyo	IIIc/ Perencana Muda	Bappeda, Pemkab. Kebumen
9.	Hj. Marsawinah, S.Sos	IIIc/ Perencana Muda	Bappeda, Pemprov. Kalsel
10.	Margono	IIIId/ Perencana Muda	Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan
11.	Mimin Rukmini, SE,MA	IIIc	BPLHD , Pemprov. Jabar
12.	Ir. Nyoman Widiatsya	IVa / Kabag. TU	Bappeda, Pemkab. Banyuwangi
13.	Yuhelemni, SP,SI	IVa/ Perencana Madya	Bappeda, Pemprov. Jambi
14.	Amirudin, SP	IIIId/ Penyuluh Pertanian Muda	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kab. Bireun
15.	Dra. R Santi Karyanti	IIIId/ Perencana Muda	Dep. KOMINFO
16.	Setyo Adhie	IVa/ Perencana Madya	Departemen Pertanian
17.	Sri Wulansari	IIIId/ Kasubbag. Umum	Bappeda, Pemkab. Wonogiri
18.	Muji Purnomo,SE	IIIc / Perencana Muda	Disperindag, Pemkab. Banyumas
19.	Syahdimal, SE,MM	Kasubbag. Penyusunan Rencana	Bappeda, Pemprov. Jambi
20.	T.Syirwan, S.Sos	IIIId/ Kasubbag. Umum	Bappeda, Pemkab. Aceh Utara
21.	Drs. H. Muchlish Huda, MM	Kasubbag. Pembinaan JFP	Departemen Agama
22.	Wahyu Kustini, S.Sos	Perencana Muda	Departemen Agama

Materi Diklat Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana terdiri dari :

1. Etika Penilaian Angka Kredit
2. Kebijakan Jabatan Fungsional Perencana
3. Konsep Dasar Perencanaan
4. Penilaian Kegiatan Penunjang Perencanaan
5. Penilaian Kegiatan Perencanaan dan praktek
6. Penilaian Kegiatan Pendidikan dan pengembangan profesi dan praktek
7. Penyusunan Laporan Angka Kredit

Hasil yang diharapkan dari kegiatan diklat Penilaian Angka Kredit Perencana yaitu (1) Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap Jabatan Fungsional Perencana dan Penilaian Angka Kredit Perencana, (2) Meningkatnya keterampilan dan perilaku peserta dalam pelaksanaan penilaian angka kredit perencana, (3) Memahami peran dan tanggungjawab peserta sebagai calon dan atau anggota tim Penilai Angka Kredit Perencana.

**Watty Karyati Roekmana**  
Perencana Madya Badan Planologi Kehutanan  
Departemen Kehutanan, Jakarta

## Pre-departure Briefing Of Bappenas Scholarship For Linkage Master Program Indonesia-Japan Universities Professional Human Resource Development Project Phase III



Jumat, 7 September 2007 bertempat di Ruang SS 1-3 Gedung Bappenas, Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang di wakili oleh Bapak Sesmeneq PPN bapak Ir. Syahril Loetan MCP. melepas keberangkatan peserta beasiswa Bappenas Program S2 Double Degree angkatan pertama ke Jepang. Program beasiswa ini terlaksana melalui Professional Human Resource Development Project Phase-III (PHRDPIII) yang akan berjalan sampai tahun 2013.

Secara politis, program ini sangat penting dan strategis untuk memberikan kontribusi bagi penguatan kompetensi pegawai pemerintah dalam upayanya memfasilitasi proses desentralisasi di Indonesia. Dengan demikian, sasaran dalam linkage program ini adalah para perencana yang bertugas di Bappenas, Bappeda, atau unit perencanaan di departemen maupun di lembaga non departemen.

Dalam proses pembangunan bangsa, seyogyanya perencana memiliki kemampuan untuk melaksanakan perannya sebagai "agent of development" yang kreatif, inovatif, dan dinamis. Dan yang paling utama, perencana harus mampu mendisain pembangunan bangsa dalam upaya

untuk lebih memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara spesifik, program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi professional pegawai pemerintah di pusat dan di daerah, di bidang perencanaan public (public planning) dan keuangan publik (public finance). Selain itu program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kapasitas/kompetensi pegawai pemerintah dalam upaya memfasilitasi proses desentralisasi di Indonesia. Sehingga sasaran dalam program ini sangat spesifik yaitu PNS Perencana atau PNS yang bekerja di instansi atau unit kerja perencanaan, yang merencanakan kegiatan maupun proram yang berorientasi kepada terwujudnya NKRI, dalam wujud kesatuan social, ekonomi, budaya dan politik, berbasiskan potensi unggulan daerah secara adil dan merata.

Salah satu program diklat gelar yang ditawarkan adalah Master linkage (double degree) antara Universitas di Indonesia dengan salah satu Universitas di Jepang, dimana peserta melaksanakan program Master tahun pertamanya di Indonesia dan melanjutkannya pada tahun





Foto-foto Dokumentasi acara Pre-departure Briefing Of Bappenas Scholarship For Linkage Master Program Indonesia-Japan Universities Professional Human Resource Development Project Phase III

kedua di Jepang. Pada akhir tahun kedua setelah lulus ujian, peserta akan mendapatkan dua gelar, yaitu satu dari Universitas di Indonesia dan satu lagi dari Universitas di Jepang.

Tahapan kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta penerima beasiswa linkage ini adalah :

1. Pelatihan bahasa inggris selama kurang lebih 6 bulan (sampai seluruh peserta mencapai nilai TOEFL minimal 550),
2. Kuliah tahun pertama di Universitas dalam negeri (perkuliahan menggunakan bahasa Inggris),
3. Pelatihan bahasa Jepang selama kurang lebih 2 bulan,
4. kuliah tahun kedua di Jepang.

Saat ini sudah 5 (lima) Program Studi dari 4 (empat) Universitas di Indonesia yang mempunyai kerja sama double degree dengan 8 (delapan) Universitas di Jepang, dan jumlah ini akan bertambah. Universitas di Indonesia tersebut adalah Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi (PPIE) UI, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK) ITB, Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM, Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) UGM, dan Magister Administrasi Publik (MAP)

Unibraw.

Untuk Angkatan I ini, jumlah peserta yang akan berangkat ke Jepang sebanyak 73 orang yang tersebar di 8 Universitas di Jepang, yaitu : GRIPS (22 orang), Hirosima University (6 orang), International University (7 orang), Ritsumeikan university (10 orang), Takhushoku University (10 orang), dan Yokohama National University (2 orang). Ke 73 peserta tersebut di rencanakan akan berangkat ke Jepang sekitar bulan September/ Oktober 2007

Dalam acara pelepasan ini Bappenas juga mengundang Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Perwakilan JBIC Jakarta, Rektor dan Program Studi Universitas di Indonesia yang memiliki linkage / double degree dengan Jepang, serta beberapa perwakilan Negara donor yang kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas dibidang pendidikan dan pelatihan seperti : NESO-Belanda, SCAC-Perancis, AusAID-Australia, JICA-Jepang, KOICA-Korea, DAAD-Jerman, NZAID-New Zealand, dan SIDA-Swedia.

Dalam sambutannya saat menghadiri acara pelepasan peserta program double degree Meneg PPN / Kepala Bappenas yang diwakili oleh Sestama,



mengucapkan selamat kepada penerima beasiswa Bappenas yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun pertama di berbagai Universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, ITB, UGM, dan Unibraw, kemudian memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan selama 1 tahun di Jepang.

Menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, Linkage Program yang sedang dilaksanakan sekarang ini bukan hanya program untuk menambah gelar akademis semata, tetapi merupakan proses peningkatan mutu dan kualitas dari seorang Perencana baik peningkatan ilmu pengetahuan maupun keterampilannya. Hal ini penting guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, selain itu juga untuk memahami secara tepat bagaimana suatu kebijakan dapat dijabarkan ke dalam program, dan selanjutnya program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dengan perincian anggaran dan biaya yang efisien.

Program pengembangan sumber daya perencana

Bappenas yang sangat strategis ini masih menggunakan dana pinjaman dari Pemerintah Jepang, yang artinya dana tersebut harus di kembalikan oleh pemerintah Indonesia yang dengan kata lain harus di bayar kembali oleh rakyat Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini beliau mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan amanat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan. Harapan dari program ini adalah bukan hanya semata-mata meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para PNS tetapi juga semakin bertambahnya keterampilan, sikap profesionalisme, dan tanggung jawab moral terhadap pembangunan Negara.

Selain itu meneg PPN/kepala Bappenas dalam sambutannya juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung program pendidikan dan pelatihan Bappenas melalui Professional Human Resource Development Project Phase III ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. **(simpul)**

## Pre-Departure Pelatihan Jangka Pendek

## LERD Planing

9 November 2007

Bappenas Ruang SS I



Pada masa Otonomi daerah sekarang ini setiap daerah lebih di tuntut lagi untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan cara mengembangkan kemampuan lokal untuk menghidupi jalannya roda pemerintahan daerahnya sendiri, tidak lagi melulu harus bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana APBN yang sudah ada, pemerintah daerah di tuntut untuk lebih kreatif dan responsip terhadap kekuatan-kekuatan lokal atau aset-aset daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, disamping usaha-usaha itu dijalankan pemerintah daerah juga di tuntut untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya agar dapat bersinergi dengan kekuatan lainnya agar dapat membuat sesuatu yang baru bagi daerah tersebut dan untuk meningkatkan PAD, bukan lagi hanya mengandalkan pajak dan retribusi seperti yang sekarang dilakukan., untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah yang sudah berjalan perlu diadakannya sebuah kegiatan atau training yang berkesinambungan dan terprogram. Menyikapi persoalan itu semua maka sejak tahun 2000-2004 hingga 2005-2009. Bappenas selaku pemerintah pusat yang juga ikut bertanggung jawab terhadap ini semua melakukan langkah kerja sama dengan Neso dalam program LERD (Local Economic Resources Development), sebagai

bentuk wujud kepedulian dan dukungan Bappenas kepada para pegawai pemerintah di daerah. Maka Bappenas bekerja sama dengan UGM, ITB memberikan atau mengadakan pelatihan-pelatihan singkat atau jangka pendek di negara Belanda dengan staff pengajar atau pemateri yang sangat mahir di bidangnya kepada para perencana di daerah, upaya ini di lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar lebih trampil dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, serta diharapkan para peserta nantinya dapat membuat perencanaan dan kebijakan, strategi dan perencanaan agar lebih efektif dan efisien dalam mendorong perkembangan ekonomi di tingkat lokal, pelatihan ini akan mengembangkan kemampuan peserta dengan menyediakan daam membuat perencanaan dalam mengembangkan kekuatan ekonomi lokal, pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada peserta tentang pemahaman konsep dasar, tahapan dan pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan sumber daya lokal tidak hanya dalam bentuk teori tetapi juga dalam prakteknya, oleh karena itu pelatihan ini di lakukan dalam dua tahapan yang pertama di Indonesia dan selanjutnya di negara Belanda sebagai tempat praktek atau studi banding bagi program yang akan di jalankan.

**Bp. Avip Syaefullah dan Mrs. Monique**  
diantara Para Peserta  
LERD (kiri),  
Kerjasama Bappenas  
dan NESO (kanan)



Pada kesempatan kali ini beberapa kelompok peserta yang berasal dari Pemkab di Indonesia berkesempatan mengikuti pelatihan jangka pendek dalam program LERD di antaranya Pemkab Bogor, Pemkab Kepulauan Seribu, Pemkab Bau-bau, Pemprov Sulsel, yang sedianya telah di lakukan pelepasan peserta untuk mengikuti pelatihan di negara Belanda selama 2 minggu oleh Pusbindiklatren yang di hadiri oleh Bapak Dr Avip Saefullah, drg.MPd dan Ibu Monic perwakilan dari NESO, adapun dalam sambutannya kepala Pusbindiklatren berharap agar pelatihan ini dapat memberikan motivasi yang lebih bagi para pegawai negeri di daerah dalam meningkatkan hasil kerja di setiap unitnya sehingga dapat meningkatkan indeks perekonomian daerahnya masing-masing, dan dapat meningkatkan kemampuan atau skill individu dari masing-masing peserta pelatihan, sementara itu harapan dari Ibu Monic sendiri tidaklah jauh berbeda dari apa yang di harapkan oleh bapak Avip dalam sambutan sebelumnya. akan tetapi ada hal lain yang diharapkan oleh Ibu Monic yaitu partisipasi aktif dari peserta nantinya saat mengikuti pelatihan di negeri Belanda tanpa ada rasa takut untuk mengemukakan sesuatu, Ibu Monic mencontohkan apabila terdapat kendala bahasa maka beberapa peserta yang lebih bisa bahasa Inggris untuk membantu peserta yang kemungkinan kurang mengerti menggunakan bahasa Inggris, karena kendala komunikasi ini sangat lah serius apabila tidak dapat diselesaikan secara bersama.

Pada acara pelepasan ini Ibu monic perwakilan dari NESO juga ingin mendengarkan komentar dari para peserta pelatihan tentang sesuatu yang sudah di dapatkan dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari para peserta. Hampir semua peserta pelatihan jangan antusias dengan program pelatihan ini, mereka banyak mendapatkan hal baru yang sangat bermanfaat bagi usahanya mengembangkan potensi lokal di daerahnya masing-masing dengan menerapkan teori yang sudah mereka dapatkan seperti di Pemkab kepulauan seribu dimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat merespon positif dengan adanya program LERD ini dan membiayai semua peserta dari Pemkab Kepulauan Seribu, dari Pemprov Sulawesi Selatan berharap para peserta pelatihan ini dapat membuat sebuah Networking bagi sesama peserta sebagai sarana untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran satu



Para peserta LERD dari berbagai daerah (atas)  
Bp. Avip dan Mrs. Monique Menanggapi masukan dari para peserta LERD (bawah)

sama lainnya dalam melaksanakan program di daerahnya masing-masing sehingga tidak terputus hanya pada saat pelatihan saja, adapun beberapa Pemkab mengusulkan pelibatan atau partispian dari masyarakatnya secara langsung sebagai peserta pelatihan, akan tetapi menurut Ibu Monic hal itu di luar kewenangan dari NESO. Karena menganggap persoalan itu adalah wilayah kerja dari LSM, seperti yang sudah dijalankan selama ini oleh LSM yang ada di negara ini. **(dwi simpul)**

## Seminar Nasional Local Economic Resource Development Pembiayaan Pembangunan Daerah ke Depan Andalkan PAD



Seiring dengan mengecilnya peran dana alokasi umum (DAU) dalam era otonomi daerah, sumber pembiayaan pembangunan daerah ke depan akan lebih mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, pemerintah daerah harus lebih aktif dan kreatif dalam mencari dan menggali sumber daya ekonomi unggulan.

“Harus menjadi pemikiran pemda, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki tidak lagi terfokus pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam,” kata Sesmeneg PPN/Bappenas, H. Ir. Syahrial Lotean, MCP yang mewakili Meneg PPN/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta, dalam sambutan pembukaan Seminar Local Economic Resource development (LERD) di Ruang SG 1-3 Bappenas, Sabtu (27/10).

Seminar bertajuk Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Unggulan Daerah ini digelar atas kerjasama Bappenas dan Netherland Education Support Office (NESO) didukung beberapa perguruan tinggi Indonesia dan Belanda, masing-masing UGM Jogjakarta, ITB Bandung, Rijks Universiteit Groningen (RUG) dan Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Belanda. Hadir pada seminar nasional ini para

pejabat dari Kedubes Belanda, pimpinan NESO, pimpinan INA (Indonesia Netherland Association), pimpinan KADIN, pejabat Kementerian Negara Koperasi dan UKM, pejabat Bappenas, dan para pembicara serta peserta seminar dari berbagai daerah.

Bapak Ir. Syahrial Lotean, MCP mengingatkan kapasitas sumber daya alam sangat terbatas dalam jumlah dan kemampuannya untuk me-recovery, bahkan sumber daya alam tertentu tidak dapat diperbaharui. Karena itu, upaya-upaya kreatif dalam menggali potensi sumber-sumber daya ekonomi perlu terus digiatkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara bijaksana. “Artinya, pengelolaan potensi ekonomi unggulan daerah harus dilakukan melalui proses perencanaan yang baik, demokratis dan memperhatikan daya dukung serta kapasitasnya,” kata Sesmeneg PPN.

### Capacity Building

Dalam sambutan panitia, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan (Kapusbindiklatren), DR. Avif Syaefullah, drg. M.Pd mengatakan seminar nasional ini merupakan bagian dari tahapan kegiatan pelatihan LERD Planning. Ini merupakan program capacity



building yang bertujuan mendorong peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah agar dapat membina dan mengembangkan potensi ekonomi daerahnya secara inovatif agar memiliki daya saing dengan produk luar. "Program pelatihan LERD Planning didesain berdasarkan keilmuan, keahlian, entrepreneurship dan pengalaman dalam usaha," kata DR. Avif Syaefullah, drg. M.Pd

Lebih lanjut, Bapak Avif menjelaskan program capacity building didesain secara terstruktur dan sistematis dalam beberapa tahapan meliputi pelatihan teori dan kunjungan lapangan di Indonesia (ITB dan UGM) dan di Belanda (RUG dan HIS). Kemudian digelar seminar lokal mengenai perkembangan rencana aksi tahap I di masing-masing daerah, dilanjutkan dengan seminar nasional LERD ini. Lewat seminar ini akan diperoleh gambaran kegiatan lanjutan pasca pelatihan dalam pengembangan produk unggulan daerah. "Dengan berkembangnya produk-produk unggulan tersebut, diharapkan adanya peningkatan yang signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD)," kata Bapak Avif Syaefullah.

Pada kesempatan itu, Direktur NESO yang diwakili Ms Monique menekankan pentingnya keadilan gender dan pemerataan asal daerah peserta, Jawa dan luar Jawa. Jumlah peserta pria dan wanita diharapkan imbang 50:50. Dalam kerjasama NESO-Bappenas yang digelar sejak 2003, katanya, jumlah peserta pria lebih besar dibanding wanita. "Karena itu, ke depan jumlah peserta wanita harus lebih besar agar secara keseluruhan jumlahnya fiftyfifty," kata Ms Monique.

Selain itu, Ms Monique mengatakan suksesnya program ini ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, pada sisi produk yang harus dipilih dan disiapkan dengan baik. Kedua, pada sisi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang harus mendukung dan memfasilitasi pengembangan produk. Ketiga, pada sisi peserta, yang harus aktif dan kreatif dalam memanfaatkan program ini secara maksimal.

"Semua kalangan berhak mengajukan proposal untuk berpartisipasi dalam program pelatihan LERD Planning ini," demikian Ungkap Ms Monique. (\*)

Jakarta, 27 Oktober 2007

Dwi Wahyu Atmaji

Karo Humas dan TU Pimpinan



Jakarta, 27 Oktober 2007  
Indonesia - NESO Netherlands - UGM -





# TPA Nasional

## Untuk Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas



Hari Sabtu tanggal 3 November 2007 yang lalu Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan Tes TPA Nasional bagi para peserta seleksi penerima Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, yang di peruntukan bagi para perencana di daerah. Seperti tahun-tahun sebelumnya tes TPA ini dilakukan di berbagai daerah. Pusbindiklatren Bappenas sendiri mengadakan tes TPA untuk calon peserta dari wilayah Jabotabek, Banten, Lampung dan Kalimantan.

Untuk lolos seleksi program S2 ini para peserta harus memenuhi skor TPA 565 untuk peserta dari pusat, 525 untuk peserta dari pemda Jawa dan 500 untuk pemda di luar Jawa. Sementara untuk program S3 skor yang harus di capai adalah 565 untuk semuanya tanpa terkecuali pusat, Jawa dan luar Jawa. Tes TPA ini sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi oleh para calon peserta untuk mendapatkan program beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas disamping persyaratan lainnya diantaranya TOEFL dan surat rekomendasi dari pimpinan instansinya. Seleksi ini merupakan salah satu tahapan yang harus di Lewati untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan layak mendapatkan beasiswa, hal ini lebih disebabkan oleh terjaminnya tingkat obyektifitas yang cukup tinggi dari tes TPA yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas itu sendiri. Seperti halnya seleksi penerimaan Pegawai Negeri dan seleksi penerimaan mahasiswa di sebuah universitas yang harus melewati Tes TPA untuk mendapatkan pegawai dan mahasiswa yang memang benar-benar berkualitas. Karena dalam mengikuti jenjang pendidikan S2 dan S3 seseorang harus memiliki kemampuan dan intelektualitas yang setara dengan jabatan yang nantinya akan dia emban. mengingat besarnya minat para perencana di daerah untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa ini maka Pusbindiklatren Bappenas merasa perlu menyelenggarakan TPA tingkat nasional yang di laksanakan di Jakarta. Peserta tes TPA untuk mengikuti seleksi ini kurang lebih sebanyak 800 orang dari berbagai daerah di Jabotabek, Banten, Lampung dan Kalimantan. Test di mulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00. semoga tes TPA ini dapat menghasilkan peserta yang benar-benar memiliki kualitas yang baik dalam mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas untuk tahun 2008. (Dwi Simpul)

## Pengalaman Berharga Dari Studi di Jepang Dengan Beasiswa Dari Oto-Bappenas



Ir. Amirullah, MA.  
( duduk no.3 dari kiri) bersama para staf Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T & PMD) Kota Pontianak

Belajar hingga ke luar negeri merupakan episode hidup yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mengapa? Karena saya terlahir dari sebuah keluarga yang sangat sederhana, kalau tidak mau dibilang pas-pasan. Ayah saya seorang guru dan Ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Apalagi kami di Kalimantan Barat adalah pendatang, dimana Ayah saya dari Majene, Sulawesi Barat, dan Ibu saya dari Malang, Jawa Timur.

Akan tetapi setelah saya renungkan sekarang, ternyata semua itu bisa terjadi tidak dengan sendirinya. Selain merupakan takdir dari Allah SWT, yang terpenting adalah apa yang ada pada diri kita dan apa saja yang kita persiapkan. Intinya adalah untuk meraih sesuatu yang bernilai, memang memerlukan kerja keras dan disiplin. Kerja keras dan disiplin membentuk kita menjadi insan yang memiliki nilai competitive. Tentu saja didukung dengan sikap yakin (optimisme) dan semangat juang (fighting spirit) yang tinggi pula.

Kesempatan studi ke luar negeri hadir pada tahun 1998, melalui OTO Bappenas, ketika saya baru 4 (empat) tahun menjadi PNS. Menurut saya, kesempatan bisa hadir dari luar dan bisa juga dari dalam diri kita (kita ciptakan). Prinsip kesempatan bisa kita ciptakan melalui nilai competitive yang kita miliki tadi. Pada waktu mengikuti test, sebelumnya atas inisiatif sendiri saya sudah beberapa kali mengikuti kursus Bahasa Inggris, dan beberapa kali pula ikut test TOEFL, test potensi akademik (TPA), dan test psikologi. Jadi sudah terbiasa dengan materi test tersebut. Pada waktu test studi ke luar negeri yang dilaksanakan OTO Bappenas dilaksanakan, hampir 500 peserta yang mengikuti. Dengan sungguh-sungguh dan dengan persiapan belajar yang keras, test tersebut saya ikuti. Mungkin sepele, saya terbiasa minta doa restu kedua orang tua dan kedua mertua saya.

Singkat cerita, melalui Surat Pusdiklat Renbang-OTO Bappenas Nomor: 081/Pusdiklat/04/98 tanggal 16 April 1998, saya sendiri dinyatakan lulus untuk mengikuti program master di luar negeri (jepang). Bagi saya ini merupakan anugerah dan pencapaian yang luar biasa, mengingat siapa diri saya ini. Apalagi setelah saya tahu waktu tiba dan berkumpul dengan teman-teman satu angkatan di Jakarta, ternyata saya satu-satunya dari pulau Kalimantan.

Persiapan yang berat ternyata ada dua, pertama menyiapkan mental istri dengan dua anak yang usianya dibawah 2 tahun, dan kedua menyiapkan administrasi surat-menyurat yang menurut saya cukup melelahkan. Bagaimana tidak, mulai dari surat rekomendasi dari pihak atasan, pihak almamater, transkrip nilai, surat tugas, surat permohonan bantuan serta surat lainnya yang harus disiapkan dalam waktu singkat.

Saya bersama dengan sekitar 30-an teman yang sebagian berasal dari Jakarta, mengikuti English for Academic Purposes (EAP) dan Bahasa Jepang, yang dimulai tanggal 4 Mei 1998 dan rencananya berakhir bulan Maret 1999. Seingat saya yang berasal dari luar Jakarta ada 6 (enam) orang, yaitu Eli Sufianty (Jawa Barat), M. Syamsul Tarigan (Jawa Barat), Dede (Lampung), Harmi Marpaung (Timor Timur), Nicolas Torano (Sulawesi Selatan), dan saya sendiri. Melalui proses wawancara pada bulan Desember 1999, di Kedutaan besar Jepang di Kawasan Thamrin, Jakarta, ternyata saya dinyatakan dapat langsung berangkat ke Jepang tanpa melalui persiapan Bahasa Jepang. Jadi seperti "terjun bebas", datang ke sebuah negeri tanpa persiapan bahasa negeri tersebut. Oh ya, ternyata wawancara dan pilihan jurusan sekolah menentukan keberangkatan juga.

Saya berangkat dan tiba di Jepang pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 1999. Keberangkatan yang berat sebenarnya, karena pada saat hari kedua Lebaran, ditambah pas datangnya pada saat musim dingin. Rombongan saya datang ke Jepang sebanyak 7 (tujuh) orang, didampingi 2 (dua) orang dari Japan-Indonesia Science and Technology Forum (JIF) dari Bandara Narita Tokyo menuju Nagoya. Kami bertujuh diterima di Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University. Singkat cerita, pengalaman selama studi di Negeri Sakura banyak membawa pelajaran yang berharga bagi diri saya pribadi dan juga istri serta anak-anak yang juga ikut hidup disana selama saya studi. Istri saya yang PNS, mengambil cuti di luar tanggungan negara.



Ir. Amirullah, MA.

Terbiasa dari orang tua dan mertua yang menjadi pendatang di Kalimantan Barat ternyata ada berkahnya juga, karena kami terbiasa selalu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat tanpa harus menghilangkan jati diri kita. Sikap selalu mengalah dan mau bergaul dengan penduduk setempat ternyata sangat manjur. Kami sekeluarga selalu mengikuti kegiatan oosoji (bersih-bersih lingkungan) setiap bulan, dan kegiatan undokai (olah raga keluarga) di musim panas. Kegiatan favorit kami sekeluarga adalah mendatangi bazar-bazar yang menjual aneka barang kebutuhan dengan harga yang murah dan punya kalender tetap di berbagai lokasi di kota Nagoya. Waktu di Jepang, saya sekeluarga tinggal di apato (apartemen sederhana) dan kemudian pindah ke jutaku (semacam rusun perumnas) di Inokoishoso 12-105, Tsutsujigaoka 201, Meito-Ku, Nagoya.

Saya juga selalu berinteraksi dengan orang Indonesia yang tinggal di Nagoya. Menjadi pengurus Persatuan pelajar Indonesia (PPI) Jepang Tengah Tahun 1999-2000 di bawah kepemimpinan Pak Edy Effendy Tejakusuma





Istri beserta anak-anak Ir. Amirullah, MA.

(mahasiswa Doktorat dari Bappenas). Kemudian ikut Kelompok Muslim Indonesia (KMI) Nagoya yang rutin mengadakan pengajian sebulan sekali. Yang paling berkesan adalah pada saat peringatan HUT Kemerdekaan RI, hampir seluruh WNI ikut hadir dalam memeriahkan acara tersebut, bahkan pada tahun 2000 Duta Besar Indonesia untuk Jepang juga hadir di tengah-tengah kami.

Yang saya kagumi dari penduduk Jepang adalah sangat menghargai privasi dan hak milik orang lain, walaupun dari minoritas. Jadi saling menghargai bukan hanya di mulut, tapi dalam tindakan nyata. Makanya tertanam dalam diri saya jangan pernah bersikap diskriminatif terhadap siapapun. Kekaguman saya yang lain adalah perilaku disiplin yang ditampakkan secara kolektif. Contoh sederhana adalah dalam membuang sampah, bahwa tidak ada yang pernah buang sampah di luar jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Hebat memang. Intinya, sistem yang baik dan disiplin akan menghasilkan individu yang baik dan disiplin juga, bukan sebaliknya.

Kembali ke masalah studi, saya diterima di GSID Nagoya University pada Department of International Development (DID). Selama 3

(tiga) bulan pertama menjadi research student dan sekaligus mempelajari bahasa Jepang. Selanjutnya kuliah seperti biasa selama setahun, kemudian menyusun thesis selama setahun. Thesis saya berjudul Oil Palm Plantations in West Kalimantan Province, Indonesia: Present Situation and Prospects for Development. Total tinggal di Jepang selama 27 bulan. Studi saya berjalan lancar, dan setelah wisuda, saya kembali ke Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2001.

Kembali ke Indonesia, dan kembali ke lingkungan kerja, ternyata membuat saya menjadi "manusia langka" di sana. Mengapa demikian? Karena saya orang pertama di pemkot Pontianak yang sekolah di luar negeri, selain itu membawa idealisme yang tinggi pula. Sejalan dengan waktu, idealisme saya ternyata telah "terbeli", mengapa? Karena menurut saya, saya hidup di tengah-tengah sistem yang masih belum disiplin yang lambat laun menyeret individu-individunya pula. Nasib. Akan tetapi hikmah yang saya dapat adalah, sekembalinya saya sekolah di luar negeri membuat nilai competitive saya makin baik di mata pimpinan. Tidak terlalu lama, semula hanya staf biasa, saya dipromosikan menjadi Kabid Penanaman Modal daerah (PMD) pada Bappeda dan PMD Kota Pontianak, dan akhirnya menjadi Kepala kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T dan PMD) Kota Pontianak sejak 21 Juli 2005 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ir. Amirullah, MA.  
 Tempat/Tgl lahir : Sambas, 4 Agustus 1969  
 Agama : Islam  
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
 Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T & PMD) Kota Pontianak

### Alamat Kantor

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T & PMD) Kota Pontianak  
 Jl. Zainuddin No.5, Pontianak - 78111  
 Telp. (0561) 738 517 ; (0561) 707 1158  
 PO Box 1158

### website:

www.kp2t.pontianak.go.id

### Alamat Rumah

Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru III B No.2  
 RT 01 / RW 33, Kelurahan Parit Tokaya,  
 Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak - 78121  
 Cell Phone. 0812 57 09429  
 Email : amier20022002@yahoo.com

### Orang Tua

Ayah : Drs. H. Muhammad Hatta Ngolo (Alm.)  
 Ibu : Nurmilah  
 Istri : Resmi Juwati, SE (Purwokerto, 9 Juni 1967)

### Anak-anak

1. Muhammad Aziz Nurwustha / Azis (Pontianak, 21 Nop 1995)
2. Muhammad Fauqa Nurzuhri / Uqa (Pontianak, 30 Jul 1997)
3. Muhammad Shaldhan Nurazkaa / Azka (Nagoya, 3 Apr 2000)

### Pendidikan

#### 1999 – 2001

Graduate School of International Development (GSID)  
 Nagoya University, Japan  
 Master of Arts (MA) Development Management, 26 Maret 2001

#### 1987 – 1992

Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak,  
 Kalimantan Barat  
 Insinyur (Ir) Budidaya Pertanian, 15 Juli 1992

#### 1984 – 1987

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat  
 Tamat, 2 Juni 1987

#### 1981 – 1984

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pontianak, Kalimantan Barat.  
 Tamat, 21 Mei 1984

#### 1975 – 1981

Sekolah Dasar (SD) Negeri 58 Pontianak, Kalimantan Barat  
 Tamat, 27 Mei 1981

### Pengalaman Pekerjaan :

#### 21 Juli 2005 – sekarang

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (KP2T dan PMD) Kota Pontianak

#### 28 Juni 2001 – 20 Juli 2005

Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BAPPEDA dan PMD) Kota Pontianak

#### 26 Juni 2001 – 20 Juli 2005

Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Penanaman Modal Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BAPPEDA dan PMD) Kota Pontianak

#### 12 Nopember 1993 – 25 Juni 2001

Staf Bidang Pendataan dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kodya Dati II Pontianak

#### 1 Juli – 11 Nopember 1993

Staf Kantor Walikotamadya KDH. Tk.II Pontianak

### Riwayat Kepangkatan :

TMT 1 Oktober	2006	Pembina/ IV a
TMT 1 April	2005	Penata Tk. I/ III d
TMT 1 April	2001	Penata / III c
TMT 1 April	1997	Penata Muda Tk.I/ III b
TMT 1 Juni	1994	Penata Muda/ III a
TMT 1 Maret	1993	CPNS

### Ketrampilan yang Dimiliki :

#### Bahasa

Bahasa Inggris – Aktif  
 Bahasa Jepang – Pasif  
 Bahasa Jawa – Ngoko (aktif), Kromo (Pasif)  
 Bahasa Melayu – Aktif

#### Komputer

MS Word, MS Excel, MS Power Point, Acrobat Reader, Internet Explorer, dll

#### Mengemudi

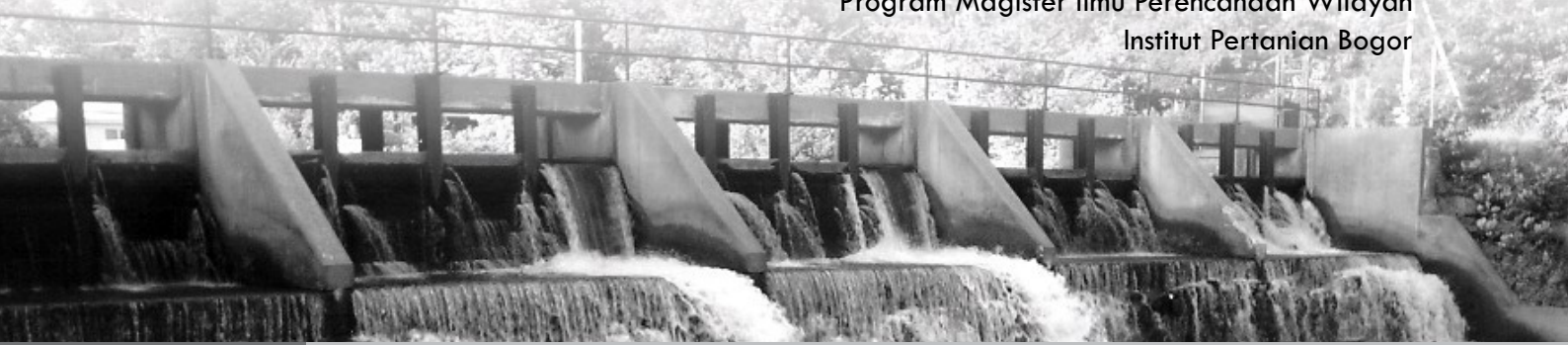
Sepeda, Sepeda Motor, Mobil

#### Musik

Gitar

#### Hobi

Sepak Bola, Bulutangkis, Catur, Gapple, Rembok, Bilyar  
 Membaca, Travelling, Exploring internet



## Kajian Pemanfaatan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Resiko Banjir Di Kabupaten Bandung

Oleh :  
Asri Savitri, Pemkab Bandung\*

### ABSTRAKSI

Bagi suatu wilayah, ruang adalah tempat untuk melangsungkan pengembangan wilayah melalui upaya penataan ruang yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Namun, sebagai konsekuensi perkembangan wilayah, terdapat pelanggaran dalam penggunaan lahan yang berasal dari kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat serta tidak disiplinnya aparat dalam menegakkan hukum sehingga berkontribusi merusak lingkungan. Berkurangnya daerah tangkapan air adalah salah satu bukti penurunan kualitas lingkungan, dan hal ini berpotensi sebagai penyebab banjir yang dapat mengakibatkan bencana.

Di kabupaten Bandung, banjir adalah fenomena yang telah berlangsung sejak dulu karena kondisi fisiknya dengan morfologi daratan, yang juga merupakan tempat pertemuan aliran sungai Citarum dengan anak-anak sungainya. Bila terjadi di daerah padat penduduk dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, banjir menjadi bermasalah karena mengakibatkan kerugian berupa korban jiwa, rusaknya prasarana umum, harta benda perorangan, sehingga dapat mengganggu dan bahkan melumpuhkan kegiatan sosial ekonomi penduduk.

Sebagai upaya pengendalian banjir, pemerintah daerah telah melakukan berbagai cara, antara lain dengan penataan ruang yang bersumber dari pengumpulan data berupa informasi baik fisik geografis, maupun sosial ekonomi (Pemkab Bandung 2001). Namun, informasi yang telah di komplikasikan baik dalam bentuk peta maupun data lain sebagai dasar penataan ruang masih belum efektif, terbukti banjir tetap terjadi yang membawa akibat tidak ringan. Kondisi masyarakat baik sosial, ekonomi dan budaya yang belum memahami sebab-sebab terjadinya banjir juga dapat menjadi keterbatasan dalam upaya ini. Sehingga, selama ini penataan ruang Kabupaten Bandung seolah-olah tidak menjadi jaminan bahwa wilayah akan terhindari dari banjir. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2005), selama ini sifat dan resiko kebencanaan belum di pertimbangkan sebagai salah satu aspek penting dalam penataan ruang di berbagai daerah, termasuk belum lengkapnya data kebencanaan dalam tata ruang terutama peta analisis resiko bencana banjir di berbagai daerah. Resiko bencana banjir merupakan kondisi buruk yang di terima suatu daerah sebagai interaksi dari kerawanan/ancaman bahaya dan kerentanan akibat fenomena banjir (Van Westen 2006). Pertanyaannya adalah bagaimanakah sebaran lokasi yang beresiko bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai propeti di daerah rawan banjir serta tanggapan masyarakat dalam bentuk aspirasi dan pemahaman terhadap banjir maupun penataan ruang.

Penelitian ini bertujuan membuat peta resiko bencana banjir, menganalisis hubungan penggunaan lahan aktual dengan banjir dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap tata ruang.

\*Penulis adalah  
peserta dari karya  
siswa yang di  
selenggarakan oleh  
Pusbindiklatren  
Bappenas.

**Instansi asal:**  
Dinas Lingkungan  
Hidup, Sub Din  
AMDAL  
**Jabatan :** Pelaksana  
**Alamat Kantor:**  
Jalan Soreang KM  
17 Kab. Bandung  
**Lama Studi:**  
18 Bulan



Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat dari bulan Juli sampai dengan September 2006. penelitian ini menggunakan metode sistem Informasi Geografis yang dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu persiapan dan pemasukan data, analisis serta penyajian hasil analisis.

Persiapan dan Pemasukan data. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penduduk (quesioner) serta cek lapang untuk verifikasi tataguna lahan dan genangan. Adapun data skunder tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Analisis data dilakukan untuk membuat peta bahaya banjir; peta resiko banjir; peta control penggunaan lahan terhadap RT dan RW, dan peta persepsi masyarakat. Pembuatan peta resiko banjir terlebih dahulu peta-peta genangan banjir (15 peta) di tumpang tindihkan untuk membuat peta bahaya banjir berdasarkan frekuensi kejadian banjir. Peta tersebut kemudian di tumpang tindihkan dengan komponen properti yaitu peta penggunaan lahan aktual, peta infrastruktur, dan peta fasos fasum yang telah di beri skor; skor untuk komponen properti di beri angka 1-3 dari rendah sedang dan tinggi didasarkan kriteria fisik yaitu nilai ekonomi, kriteria manusia dari segi aktivitas manusia di tiap jenis properti, dan kriteria manfaat dari aspek kegunaan properti, yang di tinjau dari kadar kerugian yang diterima bila terlanda banjir. Buffer diberikan pada peta infrastruktur dan peta fasum, buffer yang diberikan adalah 50m dengan mempertimbangkan genangan banjir berdasarkan fakta dilapangan setelah itu baru memperoleh nilai resiko dengan menggunakan persamaan:

Nilai Resiko = Skor Bahaya Banjir x Total skor Properti (Primayuda 2006) hasilnya adalah nilai resiko menjadi 4 kelas resiko bahaya tinggi, sedang, rendah dan tidak beresiko. Pemetaan persepsi masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang ditampilkan dalam bentuk peta yang berintegrasi dengan daerah resiko banjir. Pembuatan peta kontrol penggunaan lahan terhadap RT RW, kemungkinan penyimpangan penggunaan/ penutupan lahan dilakukan dengan operasi tumpang tindih pada peta penggunaan lahan aktual dan peta RT RW. Hasil analisis ini di sajikan dalam bentuk peta dengan bantuan perangkat lunak ArcView.

Penelitian ini menyimpulkan antara lain.

1. Secara keseluruhan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang sebesar 73%, pada setiap pemanfaatan ruang terjadi penyimpangan berkisar 50% ke atas. Contoh yg mencolok adalah

- penyimpangan tentang pemanfaatan sawah tadah hujan yang kurang dari peruntukannya dan peruntukan kawasan industri yang berlebihan,
2. Penutupan/penggunaan lahan hutan dan perkebunan yang masih relatif luas peruntukan sedangkan luas kebun campuran jauh melebihi alokasi pemanfaatan ruang, selain itu luas area sawah ternyata kurang dari peruntukannya,
3. Tingkat bahaya banjir Kabupaten Bandung di pengaruhi oleh frekuensi genangan yang terjadi akibat peristiwa banjir dalam 20 tahun terakhir menunjukkan adanya variasi genangan, tetapi pada 3 tahun terakhir alokasi genangan cenderung berpecah dan terdapat daerah yang sebelumnya tidak tergenang, secara umum terjadi pertambahan luas daerah bahaya banjir, sebaran daerah banjir terdapat pada Sub DAS Citarik, Cikapundung, Ciwidey, Cisangkuy dan Cirasea. Kelima daerah tersebut mempunyai kondisi yang buruk karena tidak mampu mengalirkan air dalam salurannya ataupun meresapkannya dengan optimal,
4. Daerah beresiko tinggi mempunyai luas 159.5 ha, beresiko sedang 3971.6 ha, beresiko rendah 9391.3 ha dan tidak beresiko seluas 293 848.5 ha.
5. Persentase luas hutan pada Sub DAS – Sub DAS stimulan banjir adalah berkisar 23 %, kondisi ini belum mencapai persyaratan minimal 30% sesuai UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan,
6. Hasil analisis penggunaan lahan aktual daerah banjir terhadap RT RW dengan kata lain RT RW yang telah dibuat tidak memperhatikan daerah banjir; 7 Masalah banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung bukan hanya akibat penyimpangan dalam pemanfaatan ruang, tetapi juga disebabkan kurang efektifnya RT RW dalam mengakomodir keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan yang memperhatikan aspek resiko banjir masyarakat. Adanya upaya penataan ruang dengan melihat aspek resiko banjir melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang yang lebih memfokuskan pada Sub DAS stimulan banjir

Catatan:

Sampai Ringkasan Tesis ini di buat dan di muat pada Majalah Simpul Perencana edisi 9 terdapat sedikit perubahan, yang di sebabkan oleh pemekaran wilayah dari hanya Kabupaten Bandung bertambah menjadi Kabupaten Bandung Barat. Sehingga jumlah RT RW serta peta geografisnya masih mengalami Revisi.

Akan tetapi untuk wilayah analisis dari Tesis ini tetap tidak berubah.

# Forgiven but not Forgotten



Oleh : Agus Mansur, SE, MA

Akhir Oktober tahun ini majalah Tempo memberikan bingkisan lebaran yang tidak enak buat kita semua. Diterima tidak nyaman, ditolak pun tidak bisa karena sudah terkirim. Majalah Tempo memberikan peringatan kepada kita semua. Bappenas di kategorikan berkinerja buruk. Meski bukan tergolong paling buruk, namun tentunya kita mesti malu melihat tampilan wajah Bappenas yang kurang elok. Walau kita bisa memperdebatkan kualitas

“pooling” yang dilakukan, tetapi rasanya kita harus mengakui bahwa apa wajah Bappenas memang masih bopeng. Kita harus berani mengakui bahwa apa yang telah direncanakan Bappenas belum sepenuhnya tepat sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pun, kita harus menyadari bahwa Bappenas belum sepenuhnya optimal dalam memberikan kontribusi dan solusi untuk memecahkan silang sengkabut persoalan bangsa yang makin pelik.

Maka, saya bisa memahami kenapa Pak Paskah Suzeta lantas mengekspresikan rencana perubahan struktur organisasi sebelum memulai acara halal bihalal di Bappenas. Sesuatu yang tergolong langka dan penuh kejutan untuk acara rutin tahunan semacam itu. Masih dalam pemahaman saya – yang tentu saja terbatas kapasitas dan kapabilitasnya, pak Paskah mungkin ingin memberikan sinyal bahwa Bappenas harus bergegas, cepat berbenah, dan lekas berubah untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam sisa masa kepemimpinan SBY-MJK yang hampir paripurna. Karenanya, perubahan struktur organisasi menjadi kebutuhan sekaligus keniscayaan. Masih dalam pemahaman saya – yang tentu saja minim legitimasi dan legalisasinya – mungkin pak Paskah haqqul yaqin bahwa “the new structure” bisa mendongkrak prestasi Bappenas sekaligus meningkatkan kontribusi Bappenas terhadap keberhasilan pemerintah secara agregat. Dalam pemahaman saya – yang sekali lagi boleh di abaikan dan tak berdosa untuk di persoalkan – mungkin pak Paskah bisa memaklumi dan memaafkan kinerja unit kerja organisasinya selama ini namun tentu saja beliau tidak bisa melupakan fakta di lapangan bahwa Bappenas memang belum pas benar dengan apa yang selama ini justru di harapkan masyarakat luas.

Dalam semangat yang hampir sama, DPR pun juga bersikap demikian. Dalam beberapa sesi pembahasan tahunan dengan Bappenas – yang kebetulan saya ikuti – DPR memberikan “catatan-catatan kaki” yang

## Forgiven but not Forgotten

kritis, lugas, dan bahkan pedas – meski tentu saja tetap politis – terhadap kualitas “annual workplan” yang telah disusun Bappenas. Namun, pada saat yang sama para anggota dewan yang terhormat juga memaklumi keterbatasan dan memahami kekurangan yang selama ini dimiliki Bappenas. Bahkan, mereka menantang Bappenas untuk berani merencanakan solusi yang benar-benar tepat dan menghasilkan terobosan yang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk kepentingan rakyat banyak, kemaslahatan umat, dan kejayaan bangsa. Bahkan, secara hiperbolis dan kelewat optimis mereka akan sangat rela, ikhlas, sekaligus senang untuk menyetujui berapapun anggaran (termasuk gaji dan tunjangan) yang akan di ajukan untuk bisa membuat Bappenas kembali trengginas. Amboi !!

Saya berharap agar majalah Tempo terus menerus memberikan “*pooling*”, “*rating*”, sekaligus “*warning*” agar Bappenas – berikut pimpinan dan seluruh anak buahnya – selalu mau berkaca terhadap realita yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Saya berharap agar majalah Tempo senantiasa menyajikan berita yang tidak saja “ enak dibaca dan perlu ” tetapi juga yang “tidak enak dibaca tapi benar ” tentang segala sepak terjang dan setiap gerak gerik keseharian Bappenas sehingga kami semua selalu rajin bercermin setiap hari dengan penuh kerendahan hati. Saya berharap agar majalah

ini tidak hanya “tempo-tempo ” mengkritik tetapi justru terus menerus memberikan penilaian yang jujur, jernih, dan berimbang kepada Bappenas setiap saat.

Kepada pak Paskah, saya berharap agar perubahan struktur organisasi Bappenas juga diikuti dengan perbaikan struktur, proporsi, komposisi, sekaligus kuantitas dan kualitas “ gizi ” yang benar-benar mencukupi, penyehatan “ jenjang kepangkatan ” yang benar-benar sehat walafiat, rasionalisasi “ unit kerja ” yang benar-benar profesional dan masuk akal, dan optimalisasi terhadap seluruh “ amunisi ” yang benar-benar layak dan bermartabat. Saya berharap agar struktur organisasi yang baru memang disusun semata-mata untuk menterjemahkan visi dan misi Bappenas secara lebih operasional dan efektif. Saya berharap agar perubahan struktur organisasi selalu dimaknai sebagai suatu urgensi untuk melakukan perbaikan kelembagaan dan bukan di salah artikan sebagai sebuah legitimasi untuk sekedar “ bongkar pasang ” strategi dan “ tambal sulam ” anggota pasukan yang selalu melelahkan, penuh ketidakpastian, ramai kasak-kusuk, padat gunjingan, dan sarat kepentingan.

Untuk Dewan yang terhormat, saya berharap agar tantangan dan janji politik yang telah di berikan kepada Bappenas dapat di wujudkan dan paling tidak, bisa di realisasikan pada tahun depan, sehingga dukungan

politik yang di berikan memang benar-benar telah di niatkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan akuntabel serta bermanfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Saya berharap agar dewan yang terhormat tidak sedang terus menerus berwacana semata tetapi memang betul-betul serius ingin menindaki ke dalam perhitungan “ angka-angka ” alokatif yang benar-benar pas sehingga bappenas kembali bernas.

Bila seluruh kritikan, dukungan, dan perubahan terhadap Bappenas memang di maksudkan untuk membuat Bappenas kembali eksis dan kembali “ bergigi ” dengan segala eksistensinya maka kita boleh bersuka cita. Tapi bila semuanya hanya sekedar formalitas dan basa-basi belaka, maka yang saya takutkan adalah pada suatu hari nanti Bapenas tidak akan pernah “ dimaafkan ” sekaligus juga perlahan-lahan akan “ dilupakan ” (unforgiven and forgotten). Dan bila itu terjadi, bolehlah kita duduk lemas di bangku taman suropati dan menagis sejadi-jadinya!!!



# Kemiskinan di Indonesia

Oleh : Dwiputro Aris Wibowo, SH

## Pendahuluan

Krisis Moneter yang beberapa tahun yang lalu datang secara tiba-tiba di kawasan Asia Tenggara telah menghancurkan perekonomian beberapa negara di kawasan ini. Bak gelombang tsunami, krisis tersebut telah meluluhlantakan sendi-sendi perekonomian berbagai negara. Dengan masa "penularan" yang sangat cepat, krisis ini dengan ganas menyebar mulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia dan Korea Selatan.

Sebab - musabab dari krisis moneter yang telah membawa efek domino luar biasa tersebut telah mengundang perdebatan para pengamat. Mengutip tulisan dari Ibrahim Yusuf, ada dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian menilai penyebab dari krisis moneter di Asia Tenggara tersebut adalah faktor internal. Dalam

pandangan kelompok ini kultur politik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak cocok dengan kultur politik barat yang memang memberi ruang pada kapitalisme, sehingga kultur politik Asia Tenggara tersebut menjadi tidak selaras dengan nilai-nilai ekonomi yang telah diimpornya. Sementara sebagian pihak lain menyatakan bahwa faktor eksternal sebagai penyebabnya menyodorkan argumen yang antara lain adalah adanya dampak perkembangan dari perekonomian negara-negara maju dan pasar keuangan global-lah yang menyebabkan ketidakseimbangan global.(Reformasi Kehidupan Bernegara, Kompas, 1999:44)

## Kemiskinan Indonesia Sebagai Problem Struktural

Di Republik tercinta ini, Krisis Moneter (krisis ekonomi) telah membawa efek kemana-mana.

Sebelum krisis melanda kita, tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita ini bisa mencapai hingga 7 % pertahun. Namun begitu dihantam oleh krisis, pertumbuhan tersebut berbalik drastis menjadi minus 13 % dan berdampak luas serta mendalam pada derajat dan kualitas kemiskinan itu sendiri. Lebih lanjut, sungguh menarik membaca temuan dan hasil diskusi panjang yang dilakukan oleh GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia). Kelompok ini memandang bahwa situasi kemiskinan atau pemiskinan sesungguhnya adalah proses pemiskinan atau kemiskinan struktural. Dalam konteks ini, kemiskinan struktural diartikan sebagai upaya sistematis terhadap perampasan daya kemampuan (capability deprivation) manusia atau kelompok masyarakat, sehingga membuat manusia atau kelompok masyarakat



“ Kemiskinan di negara ini, adalah masalah yang multidimensi.

Untuk menyelesaikannya kita harus bekerja dengan semua pihak, baik itu Pemerintah, Swasta, serta Masyarakat. ”

ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik di negeri ini semakin meningkat laksana deret ukur. Dan tentu saja, masalah kemiskinan akhirnya tetap menjadi masalah klasik yang selalu mengikuti sejarah perjalanan bangsa ini.

### Tiga Pihak

Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mencari solusi atas masalah kemiskinan di negara ini, tentunya kita semua harus bersepakat dulu bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang multidimensi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya kita harus bekerja dengan semua pihak, baik itu Pemerintah (yang tentu saja harus lintas departemen), Swasta, serta Masyarakat sebagai pihak yang dalam konteks kemiskinan struktural berada dalam posisi korban.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai penyelenggara negara, kapasitas Pemerintah dalam memberantas kemiskinan sudah sepatutnya memegang posisi yang dominan. Namun demikian, sesuai dengan amanat Undang-Undang, peran ini bukan saja menjadi peran Pemerintah Pusat semata, melainkan juga peran dari Pemerintah Daerah, khususnya daerah kabupaten/kota. Undang-Undang yang bisa dijadikan acuan dalam kasus ini paling tidak adalah Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dengan jelas bahwa Pemerintah Daerah memiliki ruang yang besar dalam



tersebut masuk dalam lingkaran kehidupan yang memiskinkan, dimiskinkan/dimarginalkan secara sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan “ perampasan daya ” tersebut adalah sebuah proses penguasaan sistematis yang dijalankan oleh kekuatan ekonomi dan politik atas hak dan daya sosial ekonomi, daya politik, dan daya psikologis warga negara ( si miskin).

Indikator dari perampasan daya dimaksud dapat dilihat dari: (1) Indeks kemiskinan manusia, (2) Penduduk yang meninggal dibawah 40 tahun, (3) Tingkat buta huruf orang dewasa, (4) Orang tanpa akses air bersih, (5) Orang tanpa akses ke jasa pelayanan kesehatan, (6) Balita kurang gizi, serta (7) Meluasnya internalisasi budaya kemiskinan. (Hal ini merupakan perspektif tanding dari ornop atas “ paradigma arus utama ”)

Kini tiba saatnya kita mencoba masuk lebih dalam untuk mengupas problem kemiskinan di Indonesia dengan satu pertanyaan mendasar, yakni: “ Apakah kemiskinan di Indonesia memang tepat untuk dikatakan sebagai sebuah pemiskinan atau kemiskinan struktural ? “

Pada sisi ini, saya sependapat dengan hasil temuan GAPRI maupun pihak - pihak yang menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia muncul karena adanya pemiskinan struktural. Argumentasi yang mendasari atas jawaban tersebut adalah adanya fakta-fakta yang ada bahwa problem kemiskinan di Indonesia sebenarnya adalah problem yang muncul bukan pada saat munculnya krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 lalu -tapi jauh sebelum itu, yakni ketika Indonesia masih dalam masa yang sering disebut dengan jaman Orde Baru. Pada masa itu, meskipun pertumbuhan ekonomi dianggap mantap ( 7 % ), namun tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi. Dan sebagaimana yang telah menjadi pengetahuan bersama, ketimpangan kesejahteraan menjadi hal yang sangat mencolok terlihat pada skala nasional. Segelintir orang menguasai prosentase besar atas daya politik dan daya ekonomi di negara ini. Dan pada giliran berikutnya sejarah telah mencatat bahwa penguasaan daya politik dan daya ekonomi oleh sebagian kecil penduduk tersebut semakin dimaksimalkan dengan cara melakukan “ perampasan daya ” terhadap warga miskin yang masih memilikinya. Dan hal inilah yang kemudian membuat grafik

kaitannya antara masyarakat dan pembangunan, halmana apabila dikerucutkan pada tema dari tulisan ini adalah hal-hal yang menyangkut tentang problem kemiskinan. Dan kata kunci yang tersurat jelas dalam Undang-Undang tersebut adalah “Partisipasi atau Pemberdayaan Masyarakat”.

Sedangkan pihak ke dua adalah Swasta (pengusaha). Pihak ini menjadi pihak yang juga penting untuk dilibatkan karena posisi pengusaha sebagai pelaku ekonomi bisa menjadi penunjang dari pemberdayaan ekonomi di tingkat bawah. Hal tersebut paling tidak bisa dilihat dari program yang telah dilakukannya, yakni memalui apa yang disebut dengan Corporate Social Responsibility. Lewat program ini, perusahaan-perusahaan dapat ikut mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro yang diantaranya dengan cara pemberian bantuan kredit bagi usaha kecil maupun perorangan yang berusaha melakukan kemandirian ekonomi. Dan dari program inilah pemberdayaan ekonomi mikro setapak demi setapak dapat menemui titik kemajuannya.

Sebagai pihak terakhir yang wajib untuk dilibatkan adalah Warga Masyarakat (miskin) itu sendiri. Dalam tahap ini masyarakat yang ada harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

### Mencari solusi

Dalam alenia sebelumnya telah disinggung bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang multidimensional. Oleh karena itu untuk memberantasnya bukan hanya membutuhkan banyak pihak, akan tetapi juga harus dengan banyak pola. Dan dalam tulisan inipun saya akhirnya juga harus meminta maaf, karena unsur-unsur yang menjadi penyebab dari kemiskinan sangatlah banyak dan variatif, maka tulisan inipun dengan segala keterbatasan yang ada tentu saja tidak akan sampai secara detil memberikan sebuah jawaban yang bisa menggambarannya hingga teknis. Namun demikian saya ingin menyampaikan kembali bahwa salah satu kata kuncinya adalah “Pemberdayaan Masyarakat”.

Bagi saya, kata kunci pemberdayaan masyarakat tersebut bukanlah kata yang bisa berdiri sendiri. Konsep ini perlu sebuah kondisi sine quanon. Dan kondisi sine quanon ini dalam beberapa hal sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah, yang dalam bentuk teknisnya berupa program yang disebut PPK, P2KP, P3DT, KUT, dsb. Namun demikian -meskipun telah membawa hasil, beberapa program tersebut masih perlu untuk dilakukan pembenahan - pembenahan yang bisa semakin memaksimalkan dari tujuan dan sasaran program. Pembenahan-pembenahan tersebut khususnya pada tingkat pengawasannya, mengingat masih banyaknya kasus mengenai terjadi kebocoran

pada pelaksanaan program.

Sedangkan hal-hal lain yang perlu untuk dilakukan Pemerintah saat ini adalah melakukan perubahan paradigma dan menindaklanjutinya dengan yang lebih kongkrit di departemen atau badan yang ada. Paradigma yang kurang menempatkan masalah kemiskinan sebagai masalah utama dan pertama dari problem pembangunan harus segera diubah. Dan perubahan paradigma ini di tingkat internasional sekarang sudah dilakukan oleh Yayasan yang memberikan penghargaan Nobel dengan cara memberikan salah satu penghargaannya kepada tokoh yang memperjuangkan perekonomian masyarakat bawah. Pada kasus di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional yang mencanangkan program sertifikasi dan pemberian lahan bagi petani yang tidak memiliki sawah apabila bukan sebatas wacana adalah kebijakan tepat yang memang harus dilakukan Pemerintah saat ini. Dan redistribusi aset ini akan semakin mempercepat menghilangkan kemiskinan apabila diikuti dengan redistribusi akses yang lain, baik akses di bidang pendidikan, kesehatan, maupun akses politik dalam arti partisipasi publik. Akses di bidang pendidikan menjadi penting karena dalam tantangan globalisasi persaingan yang terberat adalah persaingan pada tingkat keunggulan Sumber Daya Manusia.

Akses di bidang kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat karena

hanya manusia-manusia sehatlah yang bisa bekerja dan berbuat lebih produktif. Sedangkan akses politik dalam arti partisipasi publik menjadi bagian yang juga penting karena disamping program pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi publik juga akan membawa dampak psikologis yang sangat positif bagi masyarakat.

Apabila ditinjau lebih jauh, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh kita semua (bukan Pemerintah semata), mengingat masalah kemiskinan adalah juga merupakan masalah ekonomi, yaitu sebuah masalah yang menurut para ahli teori sosial seperti Emile Durkheim dan Max Weber merupakan masalah yang terproses oleh kekuatan-kekuatan politik, hukum, dan keluarga (sebagai komunitas terkecil dari masyarakat).

### Penutup

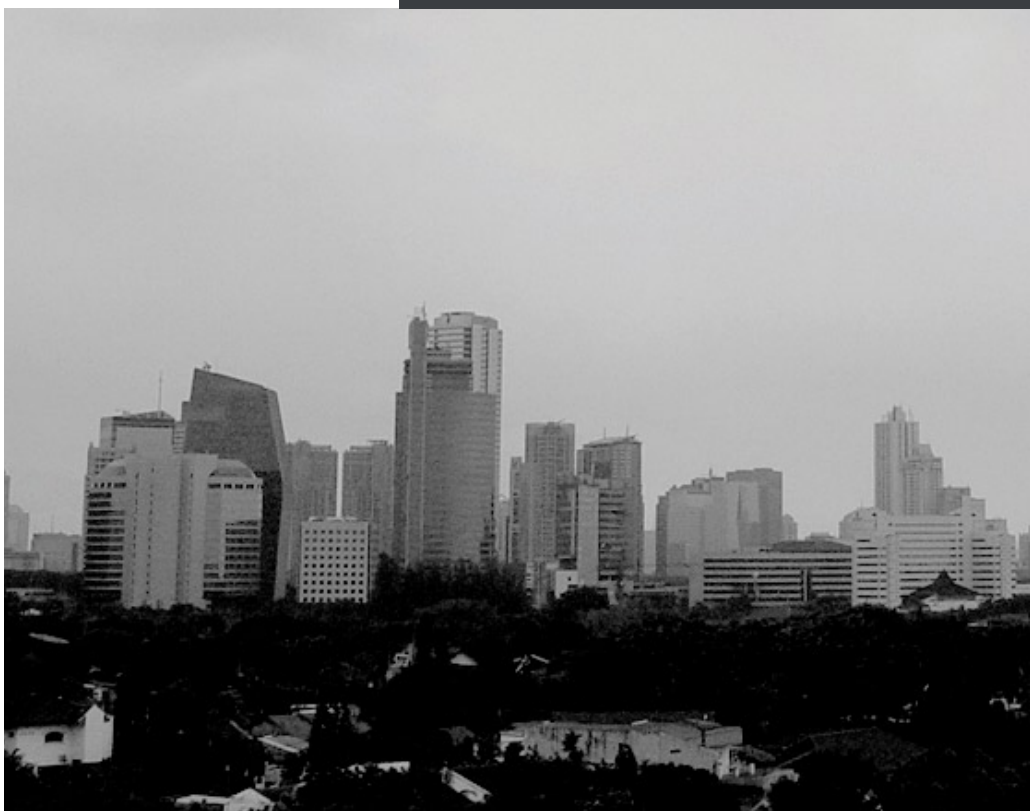
Terlepas dari pentingnya peranan dari tiga pihak yang telah disebutkan diatas, peranan pemerintah (pusat) dalam melakukan pemberantasan kemiskinan di Indonesia adalah tetap masih sangat urgen. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah (pusat) adalah institusi yang memiliki kewenangan-kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki dua pihak yang lain. Kondisi ekonomi (kemiskinan) Indonesia ketika diperhadapkan dengan globalisasi akan terlihat semakin memprihatinkan. Dan kondisi ini sangat membutuhkan

pemerintahan yang cermat dan dapat menyelamatkan dan mensejahterakan warganya. Keprihatinan ini mungkin tidak akan berlebihan ketika kita mengingat tempe yang sekarang menjadi lauk primadona kebanyakan masyarakat kita (karena dinilai sehat tapi murah) pada suatu saat nanti tiba-tiba menjadi sebuah barang yang harganya tidak terjangkau masyarakat karena hak patennya telah didaftarkan oleh warga negara dari negara lain.

Oleh karena mari kita bekerja bersama dan berdoa, semoga kondisi ini tidak semakin rumit.

(Dari berbagai Sumber)

“ pemberdayaan masyarakat tersebut bukanlah kata yang bisa berdiri sendiri. Konsep ini perlu sebuah kondisi sine quanon.”

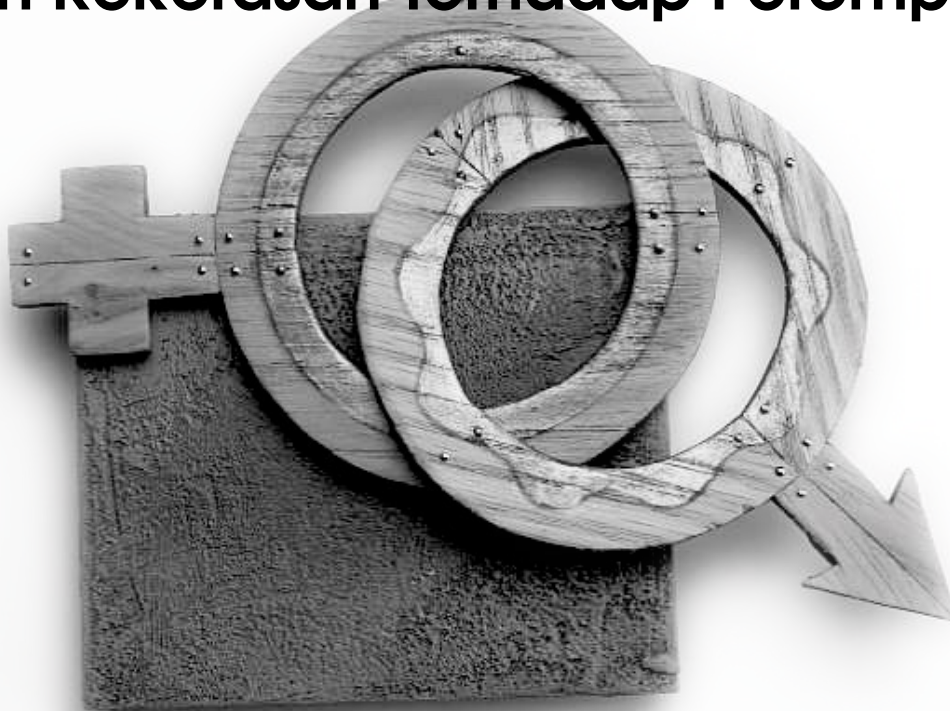




# Sekilas Tentang Gender Dan Kekerasan Terhadap Perempuan



Oleh : Santi Yulianti  
 Staf Fungsional  
 Perencana Pertama,  
 Direktorat Perkotaan,  
 Tata Ruang dan  
 Pertanahan Bappenas  
 dan aktif dalam  
 keorganisasian  
 perempuan



## Pendahuluan

Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan GENDER itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut, yang antara lain oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki mempunyai penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, vagina, hamil, melahirkan dan menyusui. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau Kodrat.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, perkasa, rasional. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih

kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain itulah yang dikenal dengan KONSEP GENDER.

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini, yang menjadi masalah adalah terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini

terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial – justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai "kodrat wanita" adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat wanita" Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak dsbnya adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan tersebut bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai kodrat wanita atau takdir Tuhan atas wanita dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga sesungguhnya adalah gender.

Dalam makalah ini, penulis mencoba berbagi informasi dan ilmu seputar perempuan dengan membatasi pada peran yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga itu sendiri. Sehingga diharapkan apabila terjadi penyimpangan atau tindakan yang mendiskriminasi bagi kaum perempuan sendiri bisa dipahami

secara komprehensif dan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

### **Perbedaan Gender dan Seks**

Apa yang membedakan antara Gender dan Seks? Menurut An Oakley seorang sosiolog Inggris pemahaman dan pembedaan antara gender dan seks sering menimbulkan persoalan Perbedaan gender sering berpangkal pada perbedaan seks. Seks itu adalah perbedaan atas kekhususan ciri-ciri biologis antara laki-laki (mempunyai sperma) dan perempuan (indung telur, rahim, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui) yang bersifat kondrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan Gender adalah perbedaan peran, tugas dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial budaya, tidak bersifat kodrati, bisa berubah tempat dan waktu serta kelas sosial yang berbeda.

Perbedaan gender ini terjadi dalam proses yang panjang, dibentuk, disosialisasikan, dibakukan dan dilestarikan serta dikonstruksikan secara sosial budaya dan diinterpretasikan oleh agama dan negara. Konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional itu perlahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Laki-laki harus bersifat kuat dan agresif, maka ia terkonstruksikan dan termotivasi menjadi lebih kuat, sedangkan perempuan

harus lemah lembut, yang sejak kecil terpengaruh secara emosi, visi dan biologis. Maka setiap sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu, selama bisa dipertukarkan bukan kodrat, melainkan adalah hasil konstruksi masyarakat. Inilah yang dinamakan GENDER.

### **Ketidakadilan Gender**

Dari hal-hal tersebut diatas, bisa dikatakan bahwa dari persoalan yang ada ternyata adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan yang menjadi korbannya (Mansour Faqih).

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan perempuan dan laki-laki menjadi korban. Untuk mengetahui sebenarnya siapa, apa dan bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu dilakukan adalah berdasarkan dari ciri-ciri diantaranya yang menjadi korban adalah perempuan itu sendiri, kemudian dilakukan karena hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, namun tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Selain itu, kekerasan yang terjadi bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang semuanya itu dapat terjadi di ruang publik dan domestik. Oleh karena itu,

untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk ketidakadilan gender akibat dari kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam kelompok :

### **Marginalisasi**

Proses pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan perempuan secara sosial maupun ekonomi. Misalnya penggunaan mesin-mesin dalam sektor pertanian telah mengakibatkan perempuan di pedesaan telah kehilangan pekerjaan mereka.

### **Diskriminasi**

Pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dikarenakan jenis kelamin, ras, agama, status sosial atau suku. Misalnya : memberikan keistimewaaan kepada anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Atau pembedaan upah buruh perempuan dan buruh laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.

### **Tindakan Kekerasan (Violence)**

kekerasan terhadap perempuan atas serangan fisik psikis dan seksual perempuan yang didasarkan pada keperempuannya. Kekerasan ini berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sesual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan. Kekerasan yang disebabkan oleh kondisi bias

gender disebut dengan gender related violence. Terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Misalnya : pemukulan terhadap perempuan, memaki istri dengan kata-kata yang tidak pantas, pemaksaan suami terhadap istri untuk berhubungan seks.

### **Stereotipe atau pelabelan negatif**

Dalam hal ini ditujukan kepada perempuan. Karena konsep gender yang menempatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki maka label yang biasanya dilekatkan pada perempuan adalah perempuan lemah, perempuan bodoh dan perempuan lebih emosional. Pelabelan ini menyebabkan perempuan sukar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal ini diperparah lagi dengan banyaknya peraturan pemerintah, perda aturan tokoh-tokoh agama, budaya dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan cenderung negatif dan merugikan. Misalnya : ketika terjadi pemerkosaan biasanya korban perempuan yang dipersalahkan dengan alasan bahwa perempuan itu dengan bersolek dan memancing perhatian yang berlebihan terhadap lawan jenisnya.

### **Multi Burden Atau Beban Kerja Lebih Panjang Dan Lebih Banyak**

Dalam hal ini beban perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduksi di dalam rumah tangganya seperti berbelanja, memasak,





membersihkan rumah, menyetrika, memelihara anak, membayar tagihan-tagihan dan sebagainya, sekaligus melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif untuk mendapatkan penghasilan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial seperti gotong royong di komunitasnya. Walaupun pekerjaan reproduksi yang telah dilakukan oleh perempuan hampir 24 jam setiap harinya, pekerjaan tersebut tidak mempunyai nilai, yang ada hanya bersifat membantu saja. Dengan kata lain perempuan hanya mendapatkan beban tetapi tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan-pekerjaannya tersebut. Bagi masyarakat kelas atas, beban kerja domestik bisa dilimpahkan kepada pekerja rumah tangga (PRT). Terkadang PRT sendiri menjalankan tugasnya tanpa perlindungan dan kejelasan kebijakan negara seperti tidak adanya UU yang

melindungi mereka. Pekerja rumah tangga sering terjebak dalam hubungan feodalistik dan bersifat perbudakan (tanpa job discription), rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seks.

#### **Sub-Ordinasi**

Lebih menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki atau menempatkan perempuan sebagai kelas dua. Subordinasi ini bersumber pada masih kuatnya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang irasional dan emosional sehingga tidak mampu memimpin dan harus selalu dibawah kaum laki-laki. Misalnya anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, perempuan tidak cocok tampil sebagai pemimpin dan sebagainya.

## **Memahami Kekerasan terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan adalah, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.

Berdasarkan ruang lingkup dan agen pelakunya, seperti dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1992), pasal 2, bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada :

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak dan perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan, dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologi yang terjadi dalam " komunitas "; termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Setelah lahirnya UU no. Tahun 2004 bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Indonesia telah membedakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.

Akar Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Salah satu bagian pertimbangan dari deklarasi PBB dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan diantara kaum laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, kedudukan dan relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban telah menjadi faktor utama penyebab kekerasan terhadap perempuan. Moore (1994) menyebutkan bahwa kekerasan itu muncul sebagai akibat dari adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin yang dikaitkan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya. Misalnya istri yang menjadi korban kekerasan suami, hanya karena suami menganggap istri serong apabila pergi ke kantor. Dengan demikian kekerasan sebenarnya lebih merupakan alat untuk melakukan kontrol sosial dan secara disadari atau tidak memberi dampak yang buruk

kepada korban.

Menurut Radhika Commaraswamy, Special Rapporteur PBB tentang kekerasan terhadap perempuan menguraikan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Korban adalah perempuan (misalnya penyunatan atau mutalasi genital, pembunuhan bayi atau janin perempuan dan kejahatan seksual. Kekerasan ini berakar pada konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan peran dalam hirarki sosial.
2. Relasinya dengan laki-laki dikarenakan perkawinan atau pertalian daerah atau relasi intim lainnya, seorang menjadi rentan dengan kekerasan domestik.
3. Perempuan menjadi anggota dari suatu kelompok sosial tertentu, seperti yang terjadi pada peristiwa perkosaan terhadap perempuan pada Mei 1998 terhadap etnis thionghoa, demikian juga yang terjadi di Aceh. Penggunaan kekerasan ini dimaksudkan sebagai alat untuk menghinakan kelompok atau komunitas dari mana perempuan tersebut berasal atau menjadi anggotanya.

Jadi jelaslah bahwa masalah ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan relasi gender adalah penyebab utama kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender mengakar pada

konteks relasi kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketimpangan ini bukan saja menciptakan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki baik secara sosial dan ekonomi, tapi juga memberikan legitimasi terhadap kekerasan yang terjadi.

Pemahaman tentang Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan terhadap perempuan acapkali disebut juga kekerasan berbasis gender sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) dan Rekomendasi Umum no. 19 Komite Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.

Kekerasan berbasis gender terjadi apabila tindak kekerasan diarahkan kepada atau dengan sengaja ditujukan kepada seorang perempuan karena ia perempuan, atau ketika tindakan tersebut mempengaruhi perempuan secara tidak seimbang, yang secara serius menyebabkan terhambatnya kemampuan kaum perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya yang merupakan hak asasi manusia (Lies Marantika dan Andy Yentriyani, Pedoman Pendokumentasian).

**Keterlibatan Semua Pihak**

Lalu apa yang dapat dilakukan terhadap fenomena bias gender dalam hal kekerasan terhadap perempuan? Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih egaliter. Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari lingkungan keluarga. Ayah dan ibu yang saling melayani dan menghormati akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pula dalam hal memutuskan berbagai persoalan keluarga, tentu tidak lagi didasarkan atas “apa kata ayah”. Jadi, orang tua yang berwawasan gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun perempuan yang kuat dan percaya diri.

Memang tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan yang setara terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Sebab di satu pihak, mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan “aturan anak perempuan” dan “aturan anak laki-laki”. Di lain pihak, mereka mulai menyadari bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan baik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan dan pembelajarannya memerlukan keterlibatan semua pihak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

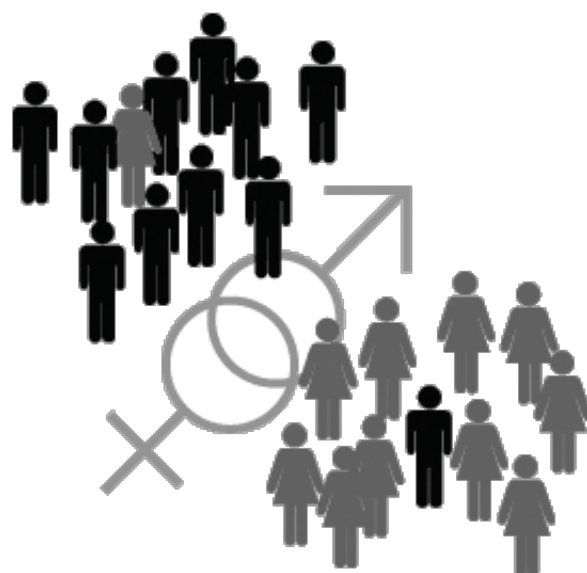
**Penutup**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa pemahaman tentang

Gender serta tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkungan rumah tangga perlu adanya suatu kesadaran dari para pemegang peran secara individual. Pembagian peran yang kaku antara peran, posisi, tugas dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Seiring dengan itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk secara perlahan tapi pasti untuk menghilangkan adanya ketimpangan, ketidakadilan terhadap perempuan diantaranya dengan melakukan berbagai diskusi, seminar dan komunikasi publik agar terdapat pemahaman yang lebih dari masyarakat luas.

**Daftar Pustaka :**

- Bahan-bahan dalam kursus Kajian Perempuan dan Gender, UI, Jakarta,
- Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Dr. Mansour Fakih, April 1996
- Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang berkeadilan Gender dalam Penanganan – Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, April 2005







Oleh :  
Hendra Yudiyanto,ST

## Konsep Security Protection Data dengan Jumlah (N) Masukan, Disertai Sistem Interrupt

### 1. Pendahuluan.

Penyimpanan data yang sifatnya sangat rahasia sangat riskan apabila akses masuk pintu datanya hanya dibuat dengan sistem satu tingkat. Tentunya sistem yang dibangun akan sangat mudah ditembus. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan sistem security yang kompleks akurat dan aman. Banyak sekali alternatif sistem security mulai dari sistem PIN beserta analogi acaknya. Namun disini penulis mencoba merencanakan salah satu alternatif sistem security tersebut, yaitu melalui jumlah (N) pintu akses dimana minimal jumlah (N) haruslah  $(N) > 2$ . Disini penulis mengambil sampel pemegang password utama ada 3 (tiga) orang. Agar sistem lebih kompleks maka akan ditambah lagi 1 (satu) orang yang mempunyai kendali dan hak interupsi terhadap sistem security yang dibangun. Dengan

kata lain sekalipun sistem tidak dibuka oleh ketiga orang tersebut, sistem tetap bisa dibuka oleh pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem interupt. Untuk mengerti konsep ini maka akan dijelaskan dasar-dasar gerbang logika (Logic Gate).

### 2. Teori AND Gate

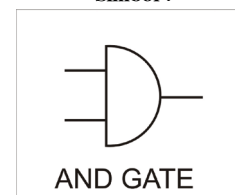
Logika ini dapat di analogikan sebagai saklar yang dirangkai secara seri. Dimana output akan ber-Logic High (1) apabila semua input ber-Logic High (1). Namun Output akan ber-Logic Low (0) apabila salah satu saja input ber-Logic Low (0). Karakteristik AND Gate dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran disamping :

Tabel Kebenaran AND Gate

Input 1	Input 2	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

0=Low; 1=High

Simbol :



### OR Gate

Logika ini dapat di analogikan sebagai saklar yang dirangkai secara paralel. Dimana output akan ber-Logic High (1) apabila salah satu input ber-Logic High (1).

Namun Output hanya akan ber-Logic Low (0) apabila semua input ber-Logic Low(0). Karakteristik OR Gate dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran dibawah ini:

Tabel kebenaran OR Gate.

Input 1	Input 2	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

0=Low; 1=High

Simbol :



**NOT Gate**

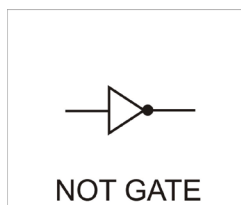
Biasa juga disebut inverter (pembalik keadaan). Dimana Output akan ber-Logic High (1) apabila input ber-Logic Low (0). Demikian sebaliknya. NOT gate hanya memiliki satu buah Input. Karakteristik NOT Gate dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran dibawah ini:

Tabel kebenaran NOT Gate

Input 1	Output
0	1
1	0

0=Low; 1=High

Simbol :

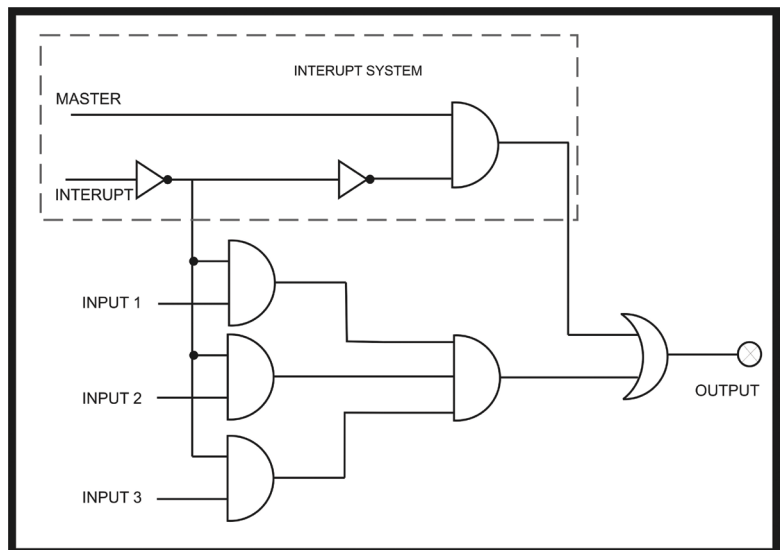


**3.Perancangan Sistem**

**Algoritma**

1. Jumlah akses masukan password (N)=3, dengan 1 target output data yang akan dibuka.
2. Taget output akan terbuka aksesnya (ber-Logic High) apabila semua akses masukan password ber-Logic High(1), dengan syarat interupt dalam keadaan Off (ber- Logic Low (0)).
3. Ketiga input (N) akan secara otomatis diabaikan apabila sistem interupt di set dengan Logic High (1).
4. Pada saat sistem interupt aktif, dengan dengan mematikan tiga input password, maka sistem akan meminta input password baru (Master). Input ini harus ber-Logic High (1) sehingga target output bisa dibuka.

**Rangkaian Logika**



#### 4. Data Yang Diperoleh

Berdasarkan Rangkaian logika yang dirancang maka dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran seperti ditunjukkan dibawah ini:

MASTER	INTERUPT	INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	OUTPUT
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1

MASTER	INTERUPT	INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	OUTPUT
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0

MASTER	INTERUPT	INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	OUTPUT
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1

MASTER	INTERUPT	INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	OUTPUT
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

## 5. Analisa Data

Bedasarkan data yang diperoleh target output akan dapat ditembus (ber-Logic High) apabila memenuhi syarat :

1. Interupt dalam keadaan Off (ber-Logic Low (0)), Input1,2, dan 3 ber-Logic High(1).
2. Interupt dalam keadaan Off (ber-Logic Low (0)), Master, Input1,2, dan 3 ber-Logic High(1). Hal ini dimungkinkan ,karena diasumsikan semua pemegang password termasuk pemegang master password menginginkan data untuk dibuka.
3. Interupt dalam keadaan On (ber-Logic High(1)), Master ber-Logic High(1).
4. Pada kondisi ini apapun Input 1,2 dan 3 menjadi tidak penting. Karena telah di interupsi oleh pemegang Master password.

Bedasarkan data yang diperoleh target output tidak akan dapat ditembus (ber-Logic Low) apabila memenuhi syarat :

1. Interupt dan Master dalam keadaan Off (ber-Logic Low (0)), salah satu saja Input1,2, dan 3 ber-Logic Low(0).
2. Interupt dalam keadaan On (ber-Logic High(1)), Master ber-Logic Low(0).
3. Pada kondisi ini kembali apapun Input 1,2 dan 3 menjadi tidak penting. Output akan bergantung dimasukkan atau tidaknya master password.
4. Interupt dalam keadaan Off (ber-Logic Low (0)), Master ber-Logic High (1). Dengan salah satu saja Input1,2, dan 3 ber-Logic Low(0).

## 6. Kesimpulan

Bedasarkan data dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa data dapat diakses apabila ketiga pemegang password menghendaki untuk membukanya. Apabila ada salah satu pemegang password tidak menghendaki akses data maka data akan tetap aman. Tetapi pengecualian apabila terjadi interupsi dari pemegang Master password, maka semua kendali berada dibawahnya. Dengan demikian input dari ketiga pemegang password otomatis diabaikan.

Input password dapat di modifikasi berasarkan kebutuhan, bisa berupa sensor-sensor dengan tingkat akurasi tinggi seperti sensor retina mata, ataupun sidik jari. Namun untuk master password yang idealnya di percayakan kepada pemimpin penting sebaiknya dihindari pemakaian sensorik fisik manusia, karena posisi strategisnya yang bisa saja digantikan orang lain.

Sistem semacam ini sangat efektif untuk menyimpan kerahasiaan suatu dokumen.

Juga mempermudah penelusuran jejak apabila terjadi kebocoran data.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Electronic and semiconductor. McGraw-Hill Professional.



## Informasi dari redaksi

Kami dari redaksi menerima tulisan atau artikel yang dapat di muat pada majalah edisi simpul berikutnya. Adapun ketentuan yang berlaku adalah:

1. Apabila akan di muat dalam Rubrik Cakrawala maka tulisan atau artikel yang masuk di kirim harus sesuai dengan tema atau judul yang di bahas pada edisi tersebut (untuk mengetahui tema atau judul dapat menghubungi redaksi)
2. Apabila hanya akan di muat pada Rubrik Opini, maka tulisan atau artikel tersebut tidak harus bersinggungan langsung dengan tema yang ada. Akan tetapi tetap mengandung unsur sebuah perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas SDM, sosial kemasyarakatan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan nasional.

Kami dari redaksi juga menerima tulisan tentang laporan kegiatan di berbagai daerah yang ingin di publikasikan melalui majalah Simpul Perencana, selama kegiatan tersebut masih berkenaan dengan perencanaan dan pelatihan-pelatihan dibidang perencanaan

Redaksi juga menerima tulisan-tulisan ringan berupa anekdot ataupun cerpen dan lain-lain (di usahakan bertema sebuah perencanaan)

Untuk semua tulisan dihapapkan juga di lampirkan foto kegiatan dan foto penulis, untuk mengirimkan tulisan dapat berbentuk File dengan aplikasi Ms Office sementara untuk mengirim gambar di pisah dari file tulisan dengan ekstensi file JPEG.

Untuk semua bahan yang dikirim, bisa langsung melalui e-mail:

**[simpul@bappenas.go.id](mailto:simpul@bappenas.go.id)** atau dikirim ke alamat:

Gedung Diklat Pusbindiklatren-Bappenas

Jl. Proklamasi No.70

Jakarta 10320

T. (021) 3912612

F. (021) 3912613

Tulisan dapat kami terima kapan saja.



107

# BEHIND THE SCENE





# AKANKAH GENERASI INI TERJUAL HABIS



**STOP! TRAFFICING**

**HENTIKAN PERDAGANGAN BAYI DAN MANUSIA**

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh majalah Simpul Perencana